



LAPORAN KEUANGAN

2023



**BPTD
KELAS II
JAWA TENGAH**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Surakarta, 30 Juni 2023
Kepala BPTD Kelas II Jawa Tengah,



Eko Agus Susanto

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	5
II. Neraca	6
III. Laporan Operasional	7
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan atas Laporan Keuangan	9
A. Penjelasan Umum	9
B. Penjelasan atas Pos Laporan Realisasi Anggaran	23
C. Penjelasan atas Pos Neraca	42
D. Penjelasan atas Pos Laporan Operasional	90
E. Penjelasan atas Pos Laporan Perubahan Ekuitas	99
F. Pengungkapan Lainnya	108
Lampiran dan Daftar	



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA TENGAH

Jl. Ahmad Yani No. 262 (Komplek
Terminal Tirtonadi) Surakarta, 57134

TELP : (0271) 7471392

FAX : (0271) 7471392

Email : bptdijatengdi@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah tingkat Eselon III selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon II (UAPPA-E2), yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Surakarta, 30 Juni 2023

**Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jawa Tengah,**



Eko Agus Susanto

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak
Lampiran II	Rincian Jumlah PNS Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2021
Lampiran III	Rincian Belanja Barang Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menggunakan akun khusus COVID
Lampiran IV	Rincian Belanja Barang Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang tidak menggunakan akun khusus COVID
Lampiran V	Rincian Belanja Modal Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menggunakan akun khusus COVID
Lampiran VI	Rincian Piutang PNB dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Lampiran VII	Mutasi Persediaan per Satker
Lampiran VIII	Rincian Persediaan yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah
Lampiran IX	Mutasi Tanah per Satker
Lampiran X	Rincian Tanah
Lampiran XI	Mutasi Peralatan dan Mesin per Satker
Lampiran XII	Mutasi Gedung dan Bangunan per Satker
Lampiran XIII	Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per Satker
Lampiran XIV	Mutasi Aset Tetap Lainnya
Lampiran XV	Rincian Aset Tetap Renovasi
Lampiran XVI	Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan
Lampiran XVII	Mutasi Aset Tak Berwujud per Satker
Lampiran XVIII	Rincian Aset Tak Berwujud
Lampiran XIX	Mutasi Aset Lain-lain per Satker
Lampiran XX	Rincian Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
Lampiran XXI	Rekapitulasi Transaksi Transfer Keluar-Transfer Masuk
Lampiran XXII	Rincian Transaksi Transfer Keluar-Transfer Masuk
Lampiran XXIII	Rincian Aset Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)
Lampiran XXIV	Rincian Aset Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP)
Lampiran XXV	Nilai Perolehan Minus dan Nilai Buku Minus

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah Semester I Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2023. Realisasi Pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebesar **Rp 2,919,941,220** atau mencapai **380 persen** dari alokasi anggaran sebesar **Rp 768,600,000**. Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2023 adalah sebesar **Rp 266,278,481,726** atau mencapai **99,52 persen** dari alokasi anggaran sebesar **Rp 267,041,946,000**.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran yang berakhir 30 Juni 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut (dalam Rupiah):

Uraian	30 Juni 2023		30 Juni 2022	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PNBP	768,600,000	2,919,941,220	0	757,600,901
Belanja	267,041,946,000	266,278,481,726	232,034,052,000	219,199,071,349

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2023. Nilai Aset per 30 Juni 2023 dicatat dan disajikan sebesar **Rp 1,724,606,586,163** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp 210,979,422,607**; Aset Tetap (neto) sebesar **Rp 1,445,888,551,387**; dan Aset Lainnya (neto) sebesar **Rp 67,738,612,169**. Nilai Ekuitas sebesar **Rp 1,724,606,586,163**.

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 dapat disajikan sebagai berikut (dalam Rupiah):

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan (Penurunan)	
	30 Juni 2023	30 Juni 2022	Rp	%
Aset				
Aset Lancar	210,979,422,607	246,536,526,034	(35,557,103,427)	(14,42)
Aset Tetap	1,445,888,551,387	1,122,022,335,221	323,866,216,166	28.86
Aset Lainnya	67,738,612,169	109,452,635,488	(41,714,023,319)	(38.11)
Jumlah Aset	1,724,606,586,163	1,478,011,496,743	246,595,089,420	16.68
Ekuitas				
Ekuitas	1,724,606,586,163	1,478,011,496,743	246,595,089,420	16.68
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	1,724,606,586,163	1,478,011,496,743	246,595,089,420	16.68

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar **Rp 0**, Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar **Rp 2,293,649,921** sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar **Rp 271,622,047,142** sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai **Rp(269,328,397,221)**. Sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar **Rp(296,902,421,132)**.

Ringkasan Laporan Operasional per 30 Juni 2023 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut (dalam Rupiah):

Uraian	30 Juni 2023	30 Juni 2022	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Kegiatan Operasional			
Pendapatan Operasional	0	0	0
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,293,649,921	673,864,000	1,619,785,921
Beban Operasional	271,622,047,142	184,922,513,976	86,699,533,166
<i>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</i>	<i>(269,328,397,221)</i>	<i>(3.199.879.334.772)</i>	<i>(85,079,747,245)</i>
Kegiatan Non Operasional			
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(27,667,405,621)	63,777,777	73,422,586
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	93,381,710	19,959,124	3.269.276.368
<i>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</i>	<i>(27,574,023,911)</i>	<i>83,736,901</i>	<i>(27,657,760,812)</i>
Surplus (Defisit) – LO	(296,902,421,132)	(184,164,913,075)	(112,737,508,057)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar **Rp22.026.261.145.825,00** dikurangi Defisit-LO sebesar **Rp(6.441.443.517.627,00)** dikurangi dengan koreksi-koreksi yang mengurangi ekuitas senilai **Rp(162.365.485.816,00)** dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp4.307.488.678.504,00** sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2023 adalah senilai **Rp19.729.940.820.886,00**.

Uraian	30 Juni 2023	30 Juni 2022	Kenaikan (Penurunan)	
			Rp	%
Ekuitas Awal	1,478,011,496,743	0	1,478,011,496,743	
Surplus (Defisit) – LO	(296,902,421,132)	(184,164,913,075)	(112,737,508,057)	
Koreksi yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas	(9,898,221,838)	29,389,528,667	(39,287,750,505)	
Transaksi Antar Entitas	553,395,732,390	1,632,786,881,151	57.109.431.310	
Kenaikan (Penurunan) Ekuitas	(2.295.320.324.939)	644.277.618.697	(1,079,391,148,761)	
Ekuitas Akhir	1,724,606,586,163	1,478,011,496,743	246,595,089,420	

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA TENGAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE 30 Juni 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022		% thd Angg	31 DESEMBER 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	768.600.000	2.919.941.220	379,90	757.600.901
JUMLAH PENDAPATAN		768.600.000	2.919.941.220	379,90	757.600.901
BELANJA					
Belanja Operasi	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	63.325.968.000	63.188.238.747	99,78	43.112.772.122
Belanja Barang	B.4	83.946.524.000	83.552.522.854	99,53	95.392.703.619
Belanja Modal	B.5	119.769.454.000	119.537.720.125	99,81	80.693.595.608
JUMLAH BELANJA		267.041.946.000	266.278.481.726	99,71	219.199.071.349

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA TENGAH NERACA

PER 30 Juni 2023 DAN 30 Juni 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Kas pada Badan Layanan Umum	C.4	-	-
Belanja Dibayar di Muka (<i>Prepaid</i>)	C.5	10.758.989.530	-
Piutang Bukan Pajak	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Persediaan	C.8	200.220.433.077	246.536.526.034
Jumlah Aset Lancar		210.979.422.607	246.536.526.034
ASET TETAP			
Tanah	C.9	327.943.408.713	326.749.763.938
Peralatan dan Mesin	C.10	338.439.261.791	280.139.302.103
Gedung dan Bangunan	C.11	1.049.825.060.634	713.139.143.029
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.12	62.931.428.611	61.607.133.876
Aset Tetap Lainnya	C.13	6.023.319.000	7.770.502.472
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.14	31.042.034.470	17.000.000.600
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.15	(370.315.961.832)	(284.383.510.797)
Jumlah Aset Tetap		1.445.888.551.387	1.122.022.335.221
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.16	1.666.149.570	987.312.585.138
Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan	C.17	0	434.000.000
Aset Lain-Lain	C.18	188.736.576.187	1.660.871.735.920
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.19	(122.664.113.588)	(646.749.694.264)
Jumlah Aset Lainnya		67.738.612.169	2.001.868.626.794
JUMLAH ASET		1.724.606.586.163	3.370.427.488.049
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.20	535.498.660	472.781.000
Uang Muka dari KPPN	C.21	0	454.548.990
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		535.498.660	927.329.990
JUMLAH KEWAJIBAN		535.498.660	927.329.990
EKUITAS			
Ekuitas	C.22	19.729.940.820.886	22.026.261.145.825
JUMLAH EKUITAS		19.729.940.820.886	22.026.261.145.825
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		19.730.476.319.546	22.027.188.475.815

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA TENGAH LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.205.587.062.860	1.434.666.571.630
JUMLAH PENDAPATAN		1.205.587.062.860	1.434.666.571.630
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	499.842.490.713	433.799.162.888
Beban Persediaan	D.3	75.067.299.626	71.918.384.560
Beban Barang dan Jasa	D.4	2.200.391.296.984	1.972.355.046.172
Beban Pemeliharaan	D.5	146.421.126.052	193.861.201.069
Beban Perjalanan Dinas	D.6	207.445.713.666	191.777.053.745
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	2.601.307.294.083	407.835.822.380
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	1.321.017.774.505	1.362.999.235.588
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	0	0
JUMLAH BEBAN		7.051.492.995.629	4.634.545.906.402
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(5.845.905.932.769)	(3.199.879.334.772)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.10		
Pendapatan Pelepasan Aset Nonlancar		2.361.384.908	2.024.926.579
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		(639.468.054.754)	(411.457.763.919)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		43.858.644.178	38.336.564.196
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(2.289.559.190)	(36.755.576)
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(595.537.584.858)	(371.133.028.720)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(6.441.443.517.627)	(3.571.012.363.492)
POS LUAR BIASA	D.11	0	0
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		(6.441.443.517.627)	(3.571.012.363.492)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA TENGAH

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
EKUITAS AWAL	E.1	22.026.261.145.825	21.381.983.527.128
Surplus/Defisit - LO	E.2	(6.441.443.517.627)	(3.571.012.363.492)
Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas	E.3	(162.365.485.816)	(35.089.265.005)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	E.3.1	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.2	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.3	6.921.977.690	(341.638.622.549)
Koreksi atas Reklasifikasi	E.3.4	(6.933.253.954)	1.165.245.808.006
Selisih Revaluasi Aset	E.3.5	0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.6	(160.364.767.396)	(613.158.283.932)
Koreksi Lain-Lain	E.3.7	(1.989.442.156)	(245.538.166.530)
Transaksi Antar Entitas	E.4	4.307.488.678.504	4.250.379.247.194
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		(2.296.320.324.939)	644.277.618.697
EKUITAS AKHIR	E.5	19.729.940.820.886	22.026.261.145.825

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Sistem Stabilitas Keuangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi serta Pelaporan Keuangan Berbasis Akrua di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
16. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.3429/KU.202/DRJD/2018 tentang Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.5238/PL.201/DRJD/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Perlengkapan Jalan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.6012/PL.201/DRJD/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara yang Diserahkan kepada Masyarakat atau Pemerintah Daerah di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

A.2 Profil, Tugas dan Fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, tugas Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan standarisasi teknis di bidang Perhubungan Darat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;

- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.

A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Guna mewujudkan tata kelola keuangan negara yang tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, proses penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan negara dilaksanakan menggunakan system informasi manajemen keuangan yang terintegrasi yang didukung dengan sistem sakti.

Sistem SAKTI yang selanjutnya disebut SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. Dalam proses pelaporan dan penyusunan laporan keuangan serta laporan barang milik negara, SAKTI menggunakan Modul Persediaan, Modul Aset Tetap dan Modul Akuntansi dan Pelaporan.

Laporan Keuangan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah Tahun 2023 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah entitas akuntansi di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah terdapat 33 satuan pelayanan. Rincian satuan pelayanan tersebut tersaji sebagai berikut:

No	Kode Satuan Pelayanan	Nama Satker	Jumlah Jenis Satuan Pelayanan	
			Aktif	Inaktif
1	403869.001.KD	Terminal Giri Adipura Wonogiri	√	
2	403869.002.KD	Terminal Tidar Magelang	√	
3	403869.003.KD	Terminal Mangkang Kota Semarang	√	
4	403869.004.KD	Terminal Jati Kudus	√	
5	403869.005.KD	Terminal Cepu Kab. Blora	√	
6	403869.006.KD	Terminal Bawen Kab. Semarang	√	
7	403869.007.KD	Terminal Pekalongan	√	
8	403869.008.KD	Terminal Kebumen	√	
9	403869.009.KD	Terminal Pemalang	√	
10	403869.010.KD	Terminal Bobotsari Kab. Purbalingga	√	
11	403869.011.KD	Terminal Mendolo Kab. Wonosobo	√	
12	403869.012.KD	Terminal Purworejo	√	
13	403869.013.KD	Terminal Tirtonadi Kota Surakarta	√	
14	403869.014.KD	Terminal Ir. Soekarno Kab. Klaten	√	
15	403869.015.KD	Terminal Tingkir Salatiga	√	
16	403869.016.KD	Terminal Bangga Mbangun Desa Kab. Cilacap	√	
17	403869.017.KD	Terminal Bulupitu Kab. Banyumas	√	
18	403869.018.KD	Terminal Giwangan Kota Yogyakarta	√	
19	403869.019.KD	Terminal Dhaksinarga Kab. Gunung Kidul	√	
20	403869.020.KD	UPPKB Subah Kab. Batang	√	
21	403869.021.KD	UPPKB Sambong Kab. Blora		√
22	403869.022.KD	UPPKB Banyudono Kab. Boyolali	√	
23	403869.023.KD	UPPKB Tanjung Kab. Brebes	√	
24	403869.024.KD	UPPKB Wanareja Kab. Cilacap	√	
25	403869.025.KD	UPPKB Gubug Kab. Grobogan		√
26	403869.026.KD	UPPKB Lebuawu Kab. Jepara		√
27	403869.027.KD	UPPKB Salam Kab. Magelang		√
28	403869.028.KD	UPPKB Ajibarang Kab. Banyumas	√	
29	403869.029.KD	UPPKB Sarang Kab. Rembang	√	
30	403869.030.KD	UPPKB Klepu Kab. Semarang	√	
31	403869.031.KD	UPPKB Toyogo Kab. Sragen		√
32	403869.032.KD	UPPKB Pringsurat Kab. Temanggung		√
33	403869.033.KD	UPPKB Selogiri Kab. Wonogiri		√
34	403869.034.KD	UPPKB Kulwaru Kab. Kulon Progo	√	
35	403869.035.KD	UPPKB Kalitirto Kab. Sleman	√	
36	403869.036.KD	UPPKB Tamanmartani Kab. Sleman	√	
37	403869.037.KD	P3D		√
38	403869.038.KD	Satker Ex. Jateng		√
39	403869.039.KD	Satker Ex DIY		√
40	403869.040.KD	Satker Ex LLAJ Jateng		√
41	403869.041.KD	Satker Ex LLASDP Jateng		√
42	403869.042.KD	Satker Ex LLAJ DIY		√
43	403869.043.KD	Satker Ex LLASDP DIY		√
44	403869.044.KD	HIBAH		√
45	403869.045.KD	Terminal Demak		√
46	403869.046.KD	Terminal Tegal	√	

No	Kode Satuan Pelayanan	Nama Satker	Jumlah Jenis Satuan Pelayanan	
			Aktif	Inaktif
47	403869.047.KD	Pelabuhan Penyeberangan Komersil Kendal	√	
48	403869.048.KD	Pelabuhan Penyeberangan Komersil Jepara	√	
Jumlah			32	16

A.4 Basis Akuntansi

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah yang merupakan entitas pelaporan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan – Laporan Realisasi Anggaran

- a) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- b) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c) Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan – Laporan Operasional

- a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;
 - o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
 - o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- c) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d) Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3. Belanja

- a) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- c) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- d) Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Beban

- a) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c) Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a) Aset Lancar

- 1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- 2) Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- 3) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- 4) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut

didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- 5) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR.
- 6) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - o harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - o harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - o harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b) Aset Tetap

- 1) Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- 2) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - o Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - o Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - o Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali

pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- 3) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- 4) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c) Penyusutan Aset Tetap

- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - o Tanah;
 - o Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - o Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 3) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- 4) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- 5) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d) Piutang Jangka Panjang

- a) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- b) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e) Aset Lainnya

- a) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- b) Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- c) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- d) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
<i>Software</i> Komputer	4 tahun
<i>Franchise</i>	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10 tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- e) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

f) Kewajiban

- a) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- b) Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

(1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- c) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

g) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode 1 Januari 2023 s.d. 30 Juni 2023, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah telah melakukan beberapa revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Belanja, dari DIPA Awal sebesar **Rp7.508.553.078.000,00** setelah revisi terakhir menjadi sebesar **Rp5.734.252.848.000,00**.

Sehingga Pagu Anggaran terlihat sebagai berikut:

Uraian	Perubahan Pagu Anggaran 2022			
	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Kenaikan (Penurunan)	% Perubahan
PENDAPATAN				
Pendapatan PNB	1.260.064.117.000	1.260.064.117.000	0	0
BELANJA				
Belanja Pegawai	529.821.112.000	503.919.106.000	(25.902.006.000)	(4,89)
Belanja Barang	2.778.327.986.000	2.924.854.923.000	146.526.937.000	5,27
Belanja Modal	2.087.095.499.000	1.936.123.311.000	(150.972.188.000)	(7,23)
Jumlah Belanja	5.395.244.597.000	5.364.897.340.000	(30.347.257.000)	(0,56)

Perubahan pagu anggaran sebesar Rp30.347.257.000,00 dikarenakan adanya pergeseran anggaran ke BA-BUN Kemenkeu dalam rangka *Automatic Adjustment*.

B.1 PENDAPATAN NEGARA

Realisasi Pendapatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar **Rp1.249.877.029.532,00** atau **99,19 persen**. Realisasi Pendapatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah, dihasilkan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pendapatan Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, Pendapatan Jasa Kepelabuhanan, Pendapatan dari Penjualan BMN berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, Penjualan Peralatan dan Mesin, Pengelolaan BMN berupa Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan, Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya, Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah dan Pendapatan Lain-lain.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
sampai dengan 30 Juni 2023*

(dalam rupiah)

Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan	
		Pendapatan	%
Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	0	7.765.470.127	0
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan dan Pemindahtanganan BMN	0	8.387.425.160	0
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Perhubungan	58.757.324.000	70.643.900.000	120,23
Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	1.151.996.505.000	1.082.672.615.068	93,98
Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	3.680.403.000	5.021.646.252	136,44
Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	0	3.039.755.000	0
Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran	0	13.035.500	0
Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	45.629.885.000	21.052.673.302	46,14
Pendapatan Jasa Lainnya	0	9.507.280	0
Pendapatan Bunga	0	54.888	0
Pendapatan Denda	0	7.546.039.380	0
Pendapatan Lain-lain	0	43.724.907.575	0
Jumlah	1.260.064.117.000	1.249.877.029.532	99,19

Realisasi Pendapatan 30 Juni 2023 mengalami penurunan sebesar 14,88 persen dibandingkan 30 Juni 2022. Hal ini disebabkan adanya ketidaktercapaian realisasi PNPB pada satker Direktorat Sarana Transportasi Jalan, yang diantaranya disebabkan oleh:

1. Permasalahan terkait pengadaan *spare part* yang terbatas diproduksi di luar negeri sebagai efek dari pandemi COVID-19, sehingga jumlah penjualan dan produksi kendaraan bermotor menurun;
2. Penurunan tarif dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, yaitu:
 - a. Penerbitan Sertifikat Uji Tipe (SUT) yang berdampak pada realisasi SUT Tahun 2023 turun sebesar 36 persen meskipun adanya peningkatan volume sebesar 74% jika dibandingkan dengan Tahun 2021; dan
 - b. Layanan Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor (SKRB) maksimal sebesar 86%. Pada Tahun 2023 terdapat peningkatan realisasi sebesar 38% dibandingkan Tahun 2021 karena adanya peningkatan volume sebesar 435% akibat penurunan tarif sesuai PMK 138 Tahun 2021 menjadi pemicu

meningkatnya perusahaan karoseri dalam mendaftar dan mengajukan SKRB.

3. Diberlakukannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis PNPB sampai dengan Rp0 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) untuk tarif SUT, SRUT, dan Uji Tipe Konversi Kendaraan Bermotor Listrik.

Rincian Pendapatan
untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	7.765.470.127	0	7.765.470.127	0
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha	8.387.425.160	3.801.601.792	4.585.823.368	120,63
Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batubara	0	30.400.000	(30.400.000)	(100)
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	68.888.888	26.600.000	42.288.888	158,98
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	645.716.991	1.055.358.347	(409.641.356)	(38,82)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1.646.779.029	942.968.232	703.810.797	74,64
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	5.936.611.458	1.670.243.213	4.266.368.245	255,43
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	382.480	0	382.480	0
Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	73.963.814	0	73.963.814	0
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	15.082.500	76.032.000	(60.949.500)	(80,16)
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	70.643.900.000	66.117.000.000	4.526.900.000	6,85
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Perhubungan	70.643.900.000	66.117.000.000	4.526.900.000	6,85
Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika	1.111.799.725.122	1.356.840.568.475	(245.040.843.353)	(18,06)
Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	1.082.672.615.068	1.340.647.055.000	(257.974.439.932)	(19,24)
Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	5.021.646.252	4.688.183.475	333.462.777	7,11
Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kelautan	3.039.755.000	1.254.290.000	1.785.465.000	142,35
Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	21.052.673.302	10.251.040.000	10.801.633.302	105,37
Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran	13.035.500	0	13.035.500	0
Pendapatan Jasa Lainnya	9.507.280	0	9.507.280	0
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan	54.888	0	54.888	0
Pendapatan Denda	7.546.039.380	9.691.402.484	(2.145.363.104)	(22,14)
Pendapatan Lain-lain	43.724.907.575	31.903.578.712	11.821.328.863	37,05
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	26.739.371	25.322.700	1.416.671	5,59
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	35.083.965.375	26.040.343.278	9.043.622.097	34,73
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	7.032.914.218	5.596.987.276	1.435.926.942	25,66
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	1.500.000	(1.500.000)	(100,00)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	1.581.288.611	239.425.458	1.341.863.153	560,45
Jumlah	1.249.877.029.532	1.468.354.151.463	(218.477.121.931)	(14,88)

Pendapatan PNBPN pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah yang paling signifikan berasal dari:

1. Direktorat Sarana Transportasi Jalan sebesar Rp1.131.357.858.469,00 yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan Pengujian Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Perhubungan sebesar Rp63.203.900.000,00;
 - b. Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.067.325.205.000,00; dan
 - c. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp383.225.915,00.
2. Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor sebesar Rp20.315.018.017,00 dengan nilai signifikan terdiri dari:
 - a. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya sebesar Rp7.765.470.127,00;
 - b. Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp12.224.410.068,00;
 - c. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Lalu sebesar Rp85.965.799,00;
 - d. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp156.715.530,00; dan
 - e. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp48.599.999,00.
3. Direktorat Lalu Lintas Jalan sebesar Rp3.888.400.052,00 dengan rincian:
 - a. Sebesar Rp3.657.300.000,00 merupakan pendapatan dari Jasa Transportasi Lainnya yang berasal dari kegiatan penerbitan persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas dan sertifikasi penyusunan analisis dampak lalu lintas;
 - b. Sebesar Rp134.584.074,00 merupakan pendapatan denda penyelesaian pekerjaan yang terdiri dari: 1) Denda Keterlambatan Penyelesaian Kegiatan Pengembangan Fasilitas Perlengkapan Jalan; 2) Denda Keterlambatan Penyelesaian Kegiatan Pengadaan Peralatan Penunjang Operasional LLAJ Tahun 2023 sebesar Rp63.072.453,00; 3) Denda Keterlambatan Penyelesaian Kegiatan

- Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerang Jalan LRK Jalur Selatan dan Jalur Pantai Utara Jawa (Ruas 111 Jladri-Wawar dan Ruas 112 Wawar-Congot) sebesar Rp8.513.514,00;
- c. Sebesar Rp41.921.978,00 yang merupakan pengembalian belanja temuan Inspektorat Jenderal berupa kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan untuk Kedaruratan TA 2020.
4. Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan sebesar Rp23.624.157.892,00 dengan rincian:
- a. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp10.730.101.160,00 merupakan pengembalian kelebihan pembayaran atas kegiatan:
- 1) Subsidi Roro Long Distance Ferry Jakarta-Surabaya Tahun 2020 sebesar Rp3.575.234.000,00;
 - 2) Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Tahun 2022 sebesar Rp3.797.631.000,00
 - 3) Dukungan PON XX Papua Tahun 2022 sebesar Rp601.596.160,00;
 - 4) Dukungan PON XX Papua Termin I-III dan Kegiatan Dukungan PON XX Papua sebesar Rp2.000.000.000,00;
 - 5) Belanja Barang Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis Pada Lintas Sei Selari-Kampung Balak, Kampung Balak-Alai Isit-Pecah Buyung sebesar Rp376.288.000,00.
- b. Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL sebesar Rp1.521.150.000,00 merupakan pengembalian kelebihan pembayaran dengan signifikan terdapat pada kegiatan:
- 1) Kajian Pengembangan Green Port pada Pelabuhan Sungai dan Danau sebesar Rp290.000.000,00;
 - 2) Penyusunan Rencana Induk Transportasi Sungai Batanghari Provinsi Jambi sebesar Rp250.000.000,00;
 - 3) Pekerjaan Penyusunan Rencana Induk Transportasi Sungai Mahakam Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp250.000.000,00; dan

- 4) Pekerjaan Studi Penyusunan Dokumen Lingkungan Pelabuhan Pulau Padar dan Pulau Kelor KSPN Labuan Bajo Provinsi NTT sebesar Rp210.000.000,00.
- c. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp1.617.184.232,00 dengan nilai signifikan merupakan denda pada pekerjaan:
 - 1) Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah pada Pekerjaan Pembangunan 1 Unit Kapal Penyeberangan RoRo (KMP Sultan Murhum II) sebesar Rp1.139.367.240,00;
 - 2) Pekerjaan Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis PT. ASDP Indonesia Ferry Persero Tahun 2022 sebesar Rp235.689.000,00;
 - 3) Angkutan Penyeberangan Perintis pada Lintas Selari-Kampung Balak, Kampung Balak-Alai Insit dan Alai Insit-Pecah Buyung sebesar Rp188.293.000,00; dan
 - 4) Pekerjaan Pembangunan Kapal Patroli Multi Purpose sebesar Rp18.083.582,00.
- d. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Perhubungan sebesar Rp7.440.000.000,00 yang merupakan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Lintas Provinsi Non Perintis dan Sertifikasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Penyeberangan Lintas Provinsi Non Perintis;
- e. Pendapatan Jasa Perkapalan sebesar Rp2.315.722.500,00 merupakan pemeriksaan dan sertifikasi keselamatan, garis muat dan pencegahan pencemaran lingkungan maritim, pelaksanaan pengukuran kapal dan penerbitan surat ukur, pemeriksaan teknis dokumen pengawakan/kepelautan.
5. Direktorat Angkutan Jalan sebesar Rp17.371.373.302,00 yang merupakan pendapatan jasa transportasi lainnya merupakan jasa angkutan berupa izin penyelenggaraan angkutan orang dan barang, serta penerbitan kartu pengawasan. Sebesar Rp968.421.144,00 merupakan Pendapatan Anggaran Lain-lain berupa Pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi biaya operasional dari Pemanfaatan BMN

yang dioperasikan oleh PPD berupa 600 unit bus dari Tahun 2016-2022;

B.2 BELANJA NEGARA

Realisasi Belanja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar **Rp5.285.236.947.122,00** atau **98,52** persen dari anggaran belanja sebesar **Rp5.364.897.340.000,00**. Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

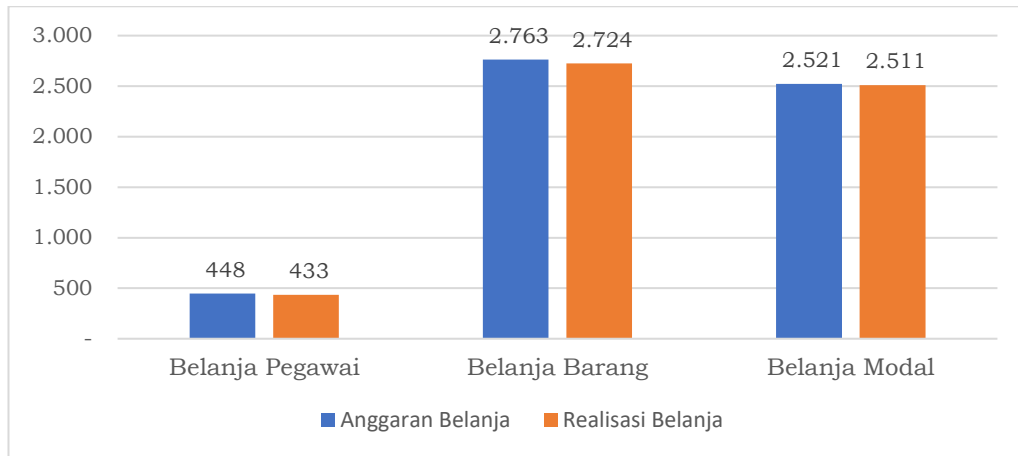
Uraian	31 Desember 2022			31 Desember 2021	
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran	Realisasi	% Naik (Turun)
Belanja Pegawai	503.919.106.000	499.842.490.713	99,19	433.799.162.888	15,22
Belanja Barang	2.924.854.923.000	2.905.823.939.162	99,35	2.724.669.949.443	6,65
Belanja Modal	1.936.123.311.000	1.879.570.517.247	97,08	2.511.525.458.561	(25,16)
Jumlah	5.364.897.340.000	5.285.236.947.122	98,52	5.669.994.570.892	(6,79)

Realisasi belanja sampai dengan 30 Juni 2023 mengalami penurunan sebesar 3,29 persen dari realisasi belanja sampai dengan 30 Juni 2022. Penurunan realisasi dikarenakan adanya penurunan pada Belanja Modal sebesar 25,16% sehingga menyebabkan penurunan belanja secara keseluruhan sebesar 3,29%.

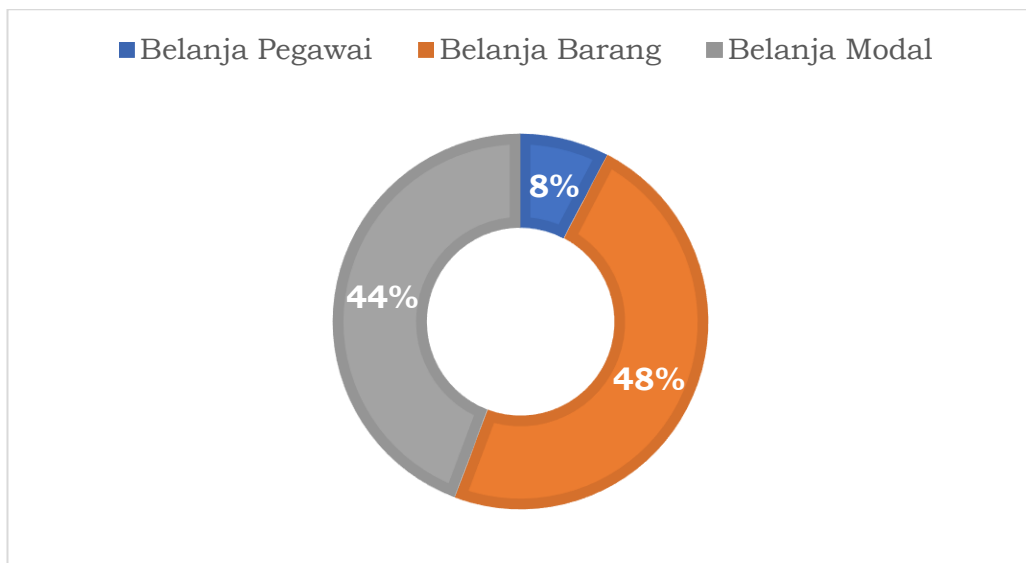
Penurunan realisasi belanja modal karena realisasi dari kegiatan belanja modal yang bersumber dari PHLN yang masih rendah dikarenakan kegiatan masih belum dilakukan proses lelang pada Tahun 2023.

Komposisi pagu anggaran dan realisasi belanja berdasarkan jenis belanja dapat dilihat dalam grafik berikut:

*Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja
sampai dengan 30 Juni 2023
(dalam miliar rupiah)*



*Komposisi Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja
sampai dengan 30 Juni 2023
(dalam rupiah)*



B.3 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp499.842.490.713,00** dan **Rp433.799.162.888,00**. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2023 mengalami kenaikan sebesar **15,22** persen dari 30 Juni 2022.

Secara presentasi mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2022, karena adanya penurunan Pagu Anggaran yang disebabkan:

1. Revisi yang dialihkan ke layanan perkantoran (Belanja Barang)
2. Revisi pergeseran ke BA BUN

Rincian Belanja Pegawai sampai dengan 30 Juni 2023 sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022		% Realisasi Anggaran	31 Desember 2021	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
BELANJA PEGAWAI					
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					
Belanja Gaji Pokok PNS	187.615.711.000	186.464.198.398	99,39	168.040.349.170	10,96
Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.196.000	2.898.865	90,70	2.632.112	10,13
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	13.633.495.000	13.565.400.728	99,50	13.505.151.814	0,45
Belanja Tunj. Anak PNS	3.986.150.000	3.949.504.372	99,08	3.985.810.649	(0,91)
Belanja Tunj. Struktural PNS	2.020.210.000	2.013.590.000	99,67	2.380.540.000	(15,41)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.019.109.000	1.005.494.000	98,66	356.385.000	182,14
Belanja Tunj. PPh PNS	1.057.000.000	1.035.610.781	97,98	1.251.778.652	(17,27)
Belanja Tunj. Beras PNS	11.636.549.000	11.585.751.350	99,56	10.901.370.300	6,28
Belanja Uang Makan PNS	30.795.784.000	30.395.873.950	98,70	28.840.255.750	5,39
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	233.370.000	219.060.000	93,87	161.060.000	36,01
Belanja Tunjangan Umum PNS	10.306.509.000	10.262.345.000	99,57	8.666.988.000	18,41
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	262.307.083.000	260.499.727.444	99,31	238.092.321.447	9,41
Belanja Lembur					
Belanja Uang Lembur	16.165.090.000	15.159.774.000	64,62	10.446.426.900	45,12
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	16.165.090.000	15.159.774.000	93,78	10.446.426.900	45,12
Belanja Tunj. Khusus dan Belanja Pegawai Transito					
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	225.446.933.000	224.182.989.269	82,17	185.260.414.541	21,01
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	225.446.933.000	224.182.989.269	99,44	185.260.414.541	21,01
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	503.919.106.000	499.842.490.713	99,19	433.799.162.888	15,22

B.4 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp2.905.823.939.162,00** dan **Rp2.724.669.949.443,00**.

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 30 Juni 2023 mengalami kenaikan **6,65** persen dari realisasi Belanja Barang sampai dengan 30 Juni 2022.

Kenaikan belanja barang dikarenakan adanya pergeseran antar jenis belanja dari belanja modal menjadi belanja barang contohnya pada pekerjaan Subsidi dengan skema Pembelian Layanan/*Buy The Service* (BTS), dan dari belanja pegawai ke belanja barang contohnya pada kegiatan layanan perkantoran.

Rincian Belanja Barang sampai dengan 30 Juni 2023 sebagai berikut:

*Realisasi Belanja Barang
sampai dengan 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2022		% Realisasi Anggaran	31 Desember 2021	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
BELANJA BARANG					
Belanja Barang Operasional	437.910.339.000	436.471.589.227	99,67	403.837.767.598	8,08
Belanja Barang Non Operasional	1.633.078.422.000	1.621.796.723.442	99,31	1.420.752.810.755	14,15
Belanja Barang Persediaan	87.736.015.000	87.435.712.433	99,66	54.948.122.279	59,12
Belanja Jasa	150.141.018.000	149.320.223.533	99,45	149.024.670.799	0,20
Belanja Pemeliharaan	157.269.006.000	156.295.778.469	99,38	195.384.715.360	(20,01)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	204.524.416.000	203.766.668.462	99,63	191.599.667.745	6,35
Belanja Perjalanan Luar Negeri	4.274.640.000	3.036.023.304	71,02	177.386.000	1.611,53
Belanja Barang BLU	989.000.000	915.421.900	92,56	177.386.000	416,06
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah	245.711.770.000	243.567.290.408	99,13	301.762.128.075	(19,29)
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah	3.220.297.000	3.218.507.984	99,94	7.182.680.832	(55,19)
Jumlah	2.924.854.923.000	2.905.823.939.162	99,35	2.724.847.335.443	6,64

Uraian	Uraian	31 Desember 2022		% Realisasi Anggaran
		Anggaran	Realisasi	
a	b	c	d	e
52	BELANJA BARANG			
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	32.937.321.000	32.934.430.357	99,99
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	10.863.428.000	10.862.561.113	99,99
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	3.063.599.000	3.056.748.590	99,78
524115	Belanja Perjalanan Dalam Negeri - Penanganan Pandemi COVID-19	2.100.000	2.100.000	100,00
526132	Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah - Penanganan Pandemi COVID-19	2.491.259.000	2.491.259.000	100,00
	Jumlah	49.357.707.000	49.347.099.060	99,98

Realisasi Belanja Barang dalam rangka penanganan dan penanggulangan *Pandemi Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada satker di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah sebesar **Rp49.347.099.060,00, BELANJA MODAL**

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar dan **Rp2.511.525.458.561,00**. Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2023 mengalami penurunan **2,45** persen dari Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2022.

*Realisasi Belanja Modal
yang berakhir 30 Juni 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2022		% Realisasi Anggaran	31 Desember 2021	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah	78.004.000	65.770.760	84,32	12.163.616.060	(99,46)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	478.394.376.000	476.421.256.118	99,59	1.079.418.256.861	(55,86)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.334.916.149.000	1.328.016.965.982	99,48	1.282.095.846.722	3,58
Belanja Modal Lainnya	120.234.782.000	72.772.699.397	60,53	137.847.738.918	(47,21)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU	2.500.000.000	2.293.824.990	91,75	137.847.738.918	(98,34)
Jumlah	1.936.123.311.000	1.879.570.517.247	97,1%	2.649.373.197.479	(29,1)

B.5.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah sampai dengan 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp65.770.760,00** dan **Rp12.163.616.060,00**. Belanja modal tanah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/pakai. Realisasi sampai dengan 30 Juni 2023 mengalami penurunan sebesar 99,46 persen dibandingkan 30 Juni 2022. Rincian Belanja Modal Tanah sampai dengan 30 Juni 2023 sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022		% Realisasi Anggaran	31 Desember 2021	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
BELANJA MODAL TANAH					
Belanja Modal Tanah	0	0	0	8.400.201.680	(100,00)
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	20.404.000	8.170.760	40,04	3.759.060.000	(99,78)
Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah	57.600.000	57.600.000	100,00	4.354.380	1.222,81
Jumlah Belanja	78.004.000	65.770.760	84,32	12.163.616.060	(99,46)

Belanja Modal Tanah terdiri dari Pembuatan Sertifikat Tanah dan Biaya Pengukuran Tanah yang terdapat pada BPTD Kelas II Jawa Tengah merupakan biaya pengukuran dan pemetaan tanah serta biaya balik nama sertifikat Terminal Tidar, Tingkir dan UPPKB Aji Barang sebesar Rp57.600.000,00 merupakan pembayaran Retribusi Pengukuran dan Cetak Peta Keterangan Rencana Kota (KRK) Terminal Tipe A Tegal.

B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp476.421.256.118,00** dan **Rp1.079.418.256.861,00**. Belanja modal peralatan dan mesin merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Realisasi sampai dengan 30 Juni 2023 mengalami penurunan sebesar 55,87 persen dibandingkan 30 Juni 2022.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 30 Juni 2023 sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022		% Realisasi Anggaran	31 Desember 2021	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	968.826.003.199	(100,00)
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	478.344.376.000	476.372.083.118	99,59	86.903.500	548.062,14
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0	108.850.155.644	(100,00)
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	50.000.000	49.173.000	98,35	1.755.724.500	(97,20)
Jumlah Belanja Netto	478.394.376.000	476.421.256.118	99,59	1.079.518.786.843	(55,87)

B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp1.328.016.965.982,00** dan **Rp1.282.095.846.722,00** Belanja modal gedung dan bangunan merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Realisasi sampai dengan 30 Juni 2023 mengalami kenaikan sebesar **3,58** persen dibandingkan 30 Juni 2022.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 30 Juni 2023 sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022		% Realisasi Anggaran	31 Desember 2021	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN					
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.215.977.137.000	1.209.136.551.771	99,44	1.100.720.591.730	9,85
Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	0	0	0	9.145.165.600	(100,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0	38.373.902.952	(100,00)
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	118.898.768.974	118.898.768.974	100,00	133.869.046.121	(11,18)
Jumlah Belanja Kotor	1.334.875.905.974	1.328.035.320.745	99,49	1.282.108.706.403	3,58
Pengembalian Belanja	0	18.354.763	0	12.859.681	42,73
Jumlah	1.334.875.905.974	1.328.016.965.982	99,49	1.282.095.846.722	3,58

Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang signifikan diantaranya terdapat pada:

1. Satker BPTD Wilayah XXV Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp192.570.809.012,00 dengan nilai signifikan merupakan pengembangan Pelabuhan Batanta Tahap I dan Tahap II, Pelabuhan Salawati Tahap I dan Tahap II;
2. Satker BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp147.585.981.000,00 dengan nilai signifikan merupakan peningkatan dan revitalisasi terminal tipe A (terminal Amplas dan Tanjung Pinggir), Rehabilitasi Dermaga dan Pelabuhan Penyeberangan (Dermaga Gunung Sitoli, Dermaga Sipinggir, dan Dermaga Teluk Dalam, Dermaga Pulau Tello, Dermaga Porsea, dan Dermaga Onan Rungu beserta dengan Supervisi);
3. Satker BPTD Wilayah XVII Provinsi Kalimantan Timur dan Utara sebesar Rp103.916.392.367,00 dengan nilai signifikan merupakan kegiatan peningkatan dan revitalisasi terminal tipe A Samarinda Seberang, Pembangunan Pelabuhan Sungai Tanjung Keramat Tahap II, Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun dan Liang Bunyu, serta pembangunan Halte Sungai di Wilayah Kabupaten Kutai Timur;
4. Satker BPTD Kelas II Jawa Tengah sebesar Rp93.075.005.522,00 dengan nilai signifikan merupakan pekerjaan Revitalisasi Terminal Tipe A pada Terminal Bobotsari, Terminal Tipe A Tegal dan Terminal Tipe A Tingkir, Pembangunan Terminal Tipe A Purworejo, dan Pembangunan Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Borobudur;
5. Satker BPTD Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp85.003.624.123,00 dengan nilai signifikan merupakan pekerjaan rehabilitasi Terminal Tipe A Puuwatu Tahap I s.d III (termasuk supervise), Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kadatua, dan Pelabuhan Penyeberangan Siompu Tahap II;
6. Satker BPTD Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nilai sebesar Rp82.930.375.000,00 dengan nilai yang signifikan merupakan pekerjaan Pembangunan Terminal Tipe A Kota Kupang dan Pekerjaan Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Nagakeo, Kab. Ende Tahap II

7. Satker BPTD Wilayah XXIV Provinsi Maluku Utara sebesar Rp56.462.702.000,00 dengan nilai signifikan merupakan pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Weda (termasuk supervise) dan Pembangunan Gedung Kantor;
8. Satker BPTD Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepulauan Riau sebesar Rp67.188.519.702,00 dengan nilai signifikan merupakan revitalisasi UPPKB Muara Lembu, Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sedanau Tahap V, Pembangunan Fasilitas Darat Pelabuhan Mengkapan, dan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sagu Lukit Tahap V (beserta Supervisi);
9. Satker BPTD Wilayah XI Provinsi Jawa Timur sebesar Rp57.967.241.860,00 dengan nilai signifikan merupakan Peningkatan/Revitalisasi Terminal Tipe A Patria Blitar dan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Kalianget (beserta supervisi).

B.5.4. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp72.772.699.397,00** dan **Rp137.847.738.918,00**. Belanja modal lainnya digunakan untuk memperoleh Aset Tetap lainnya dan Aset Lainnya yang tidak dapat dikategorikan dalam Belanja Modal Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan Mesin, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan, sampai dengan aset tersebut siap digunakan. Realisasi sampai dengan 30 Juni 2023 mengalami penurunan sebesar **47,21** persen dibandingkan 30 Juni 2022.

Rincian Belanja Modal Lainnya sampai dengan 30 Juni 2023 sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022		% Realisasi Anggaran	31 Desember 2021	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
BELANJA MODAL LAINNYA					
Belanja Modal Lainnya	120.234.782.000	72.772.699.397	60,53	137.847.738.918	(47,21)
Jumlah Belanja Kotor	120.234.782.000	72.772.699.397	60,53	137.847.738.918	(47,21)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0	0
Jumlah	120.234.782.000	72.772.699.397	60,53	137.847.738.918	(47,21)

Belanja Modal Lainnya yang signifikan diantaranya terdapat pada:

- Satker Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan sebesar Rp18.341.095737,00 merupakan penyusunan dokumen DED dan FS pembangunan pelabuhan, penyusunan dokumen teknis *buy the service* angkutan SDP, penyusunan pedoman teknis peta alur pelayaran dan buku petunjuk pelayaran sungai danau serta pengembangan digitalisasi pengawasan operasional Transportasi SDP Satker;
- Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebesar Rp17.438.299200, merupakan penyusunan DED Revitalisasi Terminal Tipe A (di Provinsi Jambi, Sumut dan Jateng), Penyusunan Studi Fasilitas Integrasi Moda di Kawasan Pelabuhan Ketapang dan Pelabuhan Gilimanuk dan UPPKB di Provinsi Sumbar dan Jambi serta Penyusunan Kebutuhan Titik Lokasi dan *Feasibility Study* Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Likupang;
- Satker Setditjen Perhubungan Darat sebesar Rp 12.333.752.410,00 merupakan DED dan Hasil Kajian penyusunan pedoman komposisi kebutuhan personil dan non personil jasa konsultasi, penyusunan rencana induk transportasi darat di KIPP IKN, evaluasi hasil pembangunan Ditjen Hubdat di Pulau Hubdat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua, Penetapan indikator individu, dan evaluasi penyelenggaraan subsidi angkutan penyeberangan perintis;
- Satker Direktorat Lalu Lintas Jalan sebesar Rp 6.682.924.250,00 merupakan Penyusunan Dokumen Teknis Standar Penanganan Dampak Lalu Lintas untuk Pusat Kegiatan/Bisnis, Pemukiman dan Infrastruktur, Penyusunan Rencana Umum Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan, kajian Teknis Penyusunan Pedoman Evaluasi Manajemen Pengelolaan BTS untuk Bidang Alat Penerangan Jalan (APJ), Penyusunan Andalalin Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Negara, DED Pembangunan ATMS Pantura Banten Segmen Serang – Cilegon, Kajian MRLD Dukungan KTT G20 Tahun 2023, Standarisasi Pelayanan Andalalin dengan penerapan ISO 9001 : 2015, Pengembangan Aplikasi TDBU Online, Optimasi Penerapan Tilang elektronik Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2023, dan Pengembangan Database Andalalin (Lanjutan).

C. PENJELASAN ATAS POS NERACA

Komposisi Neraca Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah per 30 Juni 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Neraca
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Per 30 Juni 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

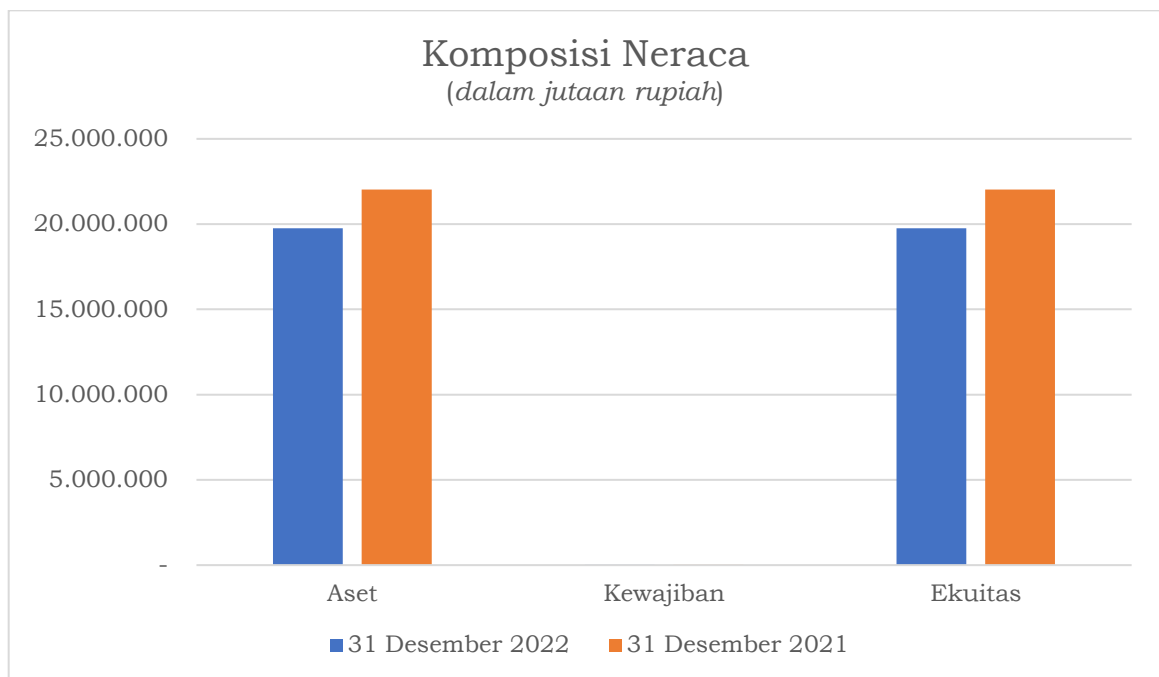
Uraian	Neraca		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
Aset Lancar	4.668.845.863.105	7.227.707.280.394	(2.558.861.417.289)	(35,40)
Aset Tetap	13.551.500.681.509	12.797.612.568.627	753.888.112.882	5,89
Aset Lainnya	1.510.129.774.932	2.001.868.626.794	(491.738.851.862)	(24,56)
JUMLAH ASET	19.730.476.319.546	22.027.188.475.815	(2.296.712.156.269)	(10,43)
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jangka Pendek	535.498.660	927.329.990	(391.831.330)	(42,25)
EKUITAS	19.729.940.820.886	22.026.261.145.825	(2.296.320.324.939)	(10,43)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	19.730.476.319.546	22.027.188.475.815	(2.296.712.156.269)	(10,43)

Saldo Aset per 30 Juni 2023 adalah sebesar **Rp19.730.476.319.546,00** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp4.668.845.863.105,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp13.551.500.681.509,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1.510.129.774.932,00.

Saldo Kewajiban dan Ekuitas per 30 Juni 2023 masing-masing sebesar **Rp535.498.660,00** yang seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu, saldo Ekuitas per 30 Juni 2023 adalah sebesar **Rp19.729.940.820.886,00**.

Jumlah Aset per 30 Juni 2023 mengalami penurunan sebesar **Rp2.296.712.156.269,00** dari jumlah Aset per 30 Juni 2022. Penurunan tersebut disertai dengan penurunan Kewajiban sebesar **Rp391.831.330,00** dan penurunan Ekuitas sebesar **Rp2.296.320.324.939,00**.

Grafik komposisi Neraca Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah per 30 Juni 2023 dan 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:



C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp454.548.990,00**. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
per 30 Juni 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN				
BPTD Wilayah XIV Prov. Kalimantan Barat	0	135.847	(135.847)	(100,00)
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN TUP				
BPTD Wilayah III Prov. Sumatera Barat	0	219.233.693	(219.233.693)	(100,00)
BPTD Wilayah XIV Prov. Kalimantan Barat	0	235.179.450	(235.179.450)	(100,00)
Jumlah	0	454.548.990	(454.548.990)	(100,00)

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp215.537.200,00** dan **Rp0,00**. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang bersumber dari pelaksanaan tugas pemerintahan dan menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Saldo Kas di Bendahara Penerimaan mencerminkan saldo yang berasal dari pendapatan layanan yang sudah diterima bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
per 30 Juni 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN				
Direktorat Angkutan Jalan	215.537.200	0	215.537.200	0
Jumlah	215.537.200	0	215.537.200	0

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Direktorat Angkutan Jalan, berasal dari layanan angkutan jalan berbasis perkotaan dengan skema Pembelian Layanan (*Buy The Service*), dan telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tgl Setor	NTPN	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	02/01/2023	AFF8A55DEVLSGQ9L	103.293.300	Penyetoran QRIS Layanan BTS tanggal 30-30 Juni 2023
2.	02/01/2023	8A4483CIFAH3N3J3	15.407.500	Penyetoran Transfer ToB Bank Mandiri Layanan BTS tanggal 30 Juni 2023
3.	03/01/2023	12B920N9VQPUG3OK	18.087.300	Penyetoran Transfer ToB BRI Layanan BTS tanggal 30 Juni 2023
4.	03/01/2023	1562255DEVLSH475	2.143.600	Penyetoran Transfer ToB BNI Layanan BTS tanggal 30 Juni 2023
5.	03/01/2023	6D1732G4VFUO8LFI	76.605.500	Penyetoran ToB BCA Layanan BTS tanggal 30 Juni 2023 - 02 Januari 2023
Jumlah			215.537.200	

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp43.117.100,00** dan **Rp0,00**. Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup Kas Lainnya di bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
per 30 Juni 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN				
Direktorat Angkutan Jalan	43.117.100	0	43.117.100	0
Jumlah	43.117.100	0	43.117.100	0

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas pada Direktorat Angkutan Jalan, berasal transaksi retur pembayaran Paket *Meeting Fullboard* kepada pihak ketiga akibat kesalahan penginputan nomor dan nama rekening penerima, dan telah dilakukan transfer kembali kepada pihak ketiga pada tanggal 2 Januari 2023 dengan Nomor Referensi: 20231231223415809311.

C.4 Kas pada Badan Layanan Umum

Saldo Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp4.556.223.237,00** dan **Rp0,00**. Kas pada BLU merupakan saldo penerimaan kas yang berasal dari pendapatan BLU yang belum digunakan pada satker Badan Layanan Umum. Saldo Kas pada BLU mencakup deposito berjangka, dengan waktu kurang dari 3 bulan. Rincian Kas pada BLU adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas pada Badan Layanan Umum
per 30 Juni 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM				
Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor	4.556.223.237	0	4.556.223.237	0
Jumlah	4.556.223.237	0	4.556.223.237	0

C.5 Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Saldo Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*) per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp59.257.343.813,00** dan **Rp0,00**. Belanja Dibayar di Muka muncul karena progres penyelesaian pekerjaan per 30 Juni 2023 belum selesai 100% namun pembayarannya sudah dilakukan secara penuh atau 100% menggunakan Jaminan / Bank Garansi. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) adalah sebagai berikut:

*Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)
per 30 Juni 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
BELANJA DIBAYAR DIMUKA				
Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	21.117.939.549	0	21.117.939.549	0
Belanja Modal yang Dibayar Dimuka (prepaid)	38.139.404.264	0	38.139.404.264	0
Jumlah	59.257.343.813	0	59.257.343.813	0

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

C.6 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp6.442.165.000,00** dan **Rp9.009.297.384,00**. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Rincian Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Piutang Bukan Pajak
per 30 Juni 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
PIUTANG PNB				
Direktorat Sarana Transportasi Jalan	6.442.165.000	8.909.265.000	(2.467.100.000)	(27,69)
PIUTANG LAINNYA				
BPTD Wilayah I Prov. Aceh	0	24.392.945	(24.392.945)	(100,00)
BPTD Wilayah VII Prov. Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	0	14.439.066	(14.439.066)	(100,00)
BPTD Wilayah IX Prov. Jawa Barat	0	33.150.000	(33.150.000)	(100,00)
BPTD Wilayah XI Prov. Jawa Timur	0	28.050.373	(28.050.373)	(100,00)
Jumlah	6.442.165.000	9.009.297.384	(2.567.132.384)	(28,49)

Nilai Piutang Bukan Pajak yang signifikan berasal dari Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Satker Direktorat Sarana Transportasi Jalan atas Potensi Kekurangan PNBP atas Jasa Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) tahun 2017 senilai **Rp683.751.900.000,00**, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja BPK RI atas Pelayanan Pengujian Tipe dan Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan Instansi Lainnya Tahun 2016 dan 2017 Nomor 82/HP/XIV/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019.

Direktorat Sarana Transportasi Jalan telah mengajukan review kepada Se Inspektorat Jenderal terhadap Piutang PNBP atas Pelayanan Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor pada Direktorat Sarana Transportasi Jalan, dengan hasil review sebagai berikut:

1. Review kesatu dengan nilai pembayaran yang disetujui sebesar Rp442.111.650.000 (empat ratus empat puluh dua miliar seratus sebelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah disesuaikan pada koreksi audited LK Tahun 2020;
2. Review kedua dengan nilai pembayaran yang disetujui sebesar Rp206.270.400.000 (dua ratus enam miliar dua ratus tujuh puluh

juta empat ratus ribu rupiah) dan telah disesuaikan pada LK Triwulan III Tahun 2022;

3. Reviu ketiga nilai pembayaran yang disetujui sebesar Rp32.902.750.000 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dari nilai Rp32.902.750.000,00 yang telah disetujui oleh Inspektorat sesuai Surat Inspektur Jenderal Nomor KU.102/1/1/ITJEN/2023 tanggal 05 Januari 2023, telah penyesuaian/koreksi nilai Piutang PNBPN senilai Rp26.460.585.000,00 dalam jurnal koreksi Laporan Keuangan Tahun 2022 *audited*, dan sisanya tidak diakui oleh Tim Pemeriksa BPK.
4. Reviu keempat dengan nilai pembayaran yang disetujui sebesar Rp2.567.132.383 (dua miliar lima ratus enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) dan telah disesuaikan pada LK Tahun 2023 *unaudited*.

Rincian Piutang PNBPN dan tindak lanjut penyelesaian Temuan Hasil Pemeriksaan Kinerja BPK, adalah sebagai berikut:

No	Nama APM	Nilai Temuan SRUT (LHP Kinerja BPK RI)	Penyesuaian Nilai Piutang PNBPN pada Laporan Keuangan			Piutang PNBPN	Penyesuaian	Sisa Piutang PNBPN
			Reviu Pertama	Reviu Kedua	Reviu Ketiga	01 Januari 2022	Reviu Keempat	31 Desember 2022
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g = c-d-e-f</i>	<i>h</i>	<i>i = g-h</i>
1	PT. Mercedes-Benz Distribution Indonesia	190.000.000	190.000.000	0	0	0	0	0
2	PT. Tjahja Sakti Motor (BMW, MINI, Peugeot)	1.692.000.000	1.691.000.000	1.000.000	0	0	0	0
3	PT. TVS Motor Company Indonesia	117.600.000	115.800.000	1.800.000	0	0	0	0
4	PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing	130.551.100.000	119.050.500.000	11.500.600.000	0	0	0	0
5	PT. Astra Honda Motor	434.660.200.000	239.476.200.000	176.510.800.000	18.673.200.000	0	0	0
6	PT. Garuda Mataram Motor (VW dan Audi)	286.000.000	144.500.000	1.000.000	96.500.000	44.000.000	44.000.000	0
7	PT. Tata Motor Indonesia	347.750.000	81.500.000	0	0	266.250.000	0	266.250.000
8	PT. Hyundai Indonesia Motor	484.000.000	330.500.000	11.750.000	0	141.750.000	0	141.750.000
9	PT. Astra Daihatsu Motor	9.994.750.000	5.988.000.000	2.208.250.000	0	1.798.500.000	0	1.798.500.000
10	PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia	15.001.250.000	14.423.500.000	0	0	577.750.000	0	577.750.000
11	PT. Kawasaki Motor Indonesia	3.922.900.000	964.300.000	508.100.000	2.368.300.000	82.200.000	0	82.200.000
12	PT Suzuki Indomobil Motor	31.360.100.000	21.201.600.000	7.234.850.000	700.000	2.922.950.000	2.167.600.000	755.350.000
13	PT. Toyota - Astra Motor	50.061.500.000	37.234.250.000	6.618.250.000	3.711.750.000	2.497.250.000	0	2.497.250.000
14	PT. Eurokars Motor Indonesia (Mazda)	600.750.000	600.750.000	0	0	0	0	0
15	PT. Honda Prospect Motor (Honda Mobil)	3.043.000.000	314.500.000	1.674.000.000	1.049.385.000	5.115.000	0	5.115.000
16	PT. Hino Motor Sales Indonesia	4.750.000	4.750.000	0	0	0	0	0
17	PT. Nissan Motor Distributor Indonesia	860.750.000	300.000.000	0	560.750.000	0	0	0
18	PT. Kia Indonesia Motor	318.000.000	0	0	0	318.000.000	0	318.000.000
19	PT. Auto Euro Indonesia (Renault)	255.500.000	0	0	0	255.500.000	255.500.000	0
Jumlah		683.751.900.000	442.111.650.000	206.270.400.000	26.460.585.000	8.909.265.000	2.467.100.000	6.442.165.000

Rincian Piutang PNBPN dan mutasi piutang terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp 0** dan **Rp 0**. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Penyisihan Piutang Bukan Pajak – Piutang Bukan Pajak

Per 30 Juni 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Piutang Bukan Pajak (Bruto)	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Bukan Pajak	-	-	-	-
Piutang Bukan Pajak (Netto)	-	-	-	-

Perhitungan Penyisihan Piutang Bukan Pajak – Piutang Bukan Pajak

Per 30 Juni 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Piutang Bukan Pajak (Bruto)	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Bukan Pajak	Piutang Bukan Pajak (Netto)
1	2	3	4	5
Lancar	0	0,5%	0	0
Kurang Lancar	0	10%	0	0
Diragukan	0	50%	0	0
Macet	0	100%	0	0
Jumlah	-		-	-

Piutang Bukan Pajak yang dikategorikan sebagai Piutang Bukan Pajak dengan kualitas Macet dan disisihkan seluruhnya (100%).

C.8 Persediaan

Saldo Persediaan per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp4.598.680.097.580,00** dan **Rp7.218.731.363.007,00**.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan yang signifikan, terdiri atas barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional (Barang Konsumsi, Bahan untuk Pemeliharaan, Suku Cadang, dan Persediaan Lainnya) dan Barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per tanggal 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan
per 30 Juni 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
Barang Konsumsi	41.150.048.991	27.779.212.782	13.370.836.209	48,13
Bahan untuk Pemeliharaan	413.115.364	122.971.895	290.143.469	235,94
Suku Cadang	44.132.578	28.771.150	15.361.428	53,39
Tanah Bangunan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	1.795.818.627.242	3.261.508.663.508	(1.465.690.036.266)	(44,94)
Peralatan dan Mesin untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	1.600.400.272.423	2.143.910.253.702	(543.509.981.279)	(25,35)
Jalan Irigasi dan Jaringan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	1.132.404.442.151	1.668.627.207.994	(536.222.765.843)	(32,14)
Aset Tetap Lainnya untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	20.669.339.000	84.732.118.799	(64.062.779.799)	(75,61)
Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	1.136.809.876	9.911.050.130	(8.774.240.254)	(88,53)
Bahan Baku	6.643.309.955	6.744.940.789	(101.630.834)	(1,51)
Persediaan Lainnya	0	15.366.172.258	(15.366.172.258)	(100,00)
Jumlah	4.598.680.097.580	7.218.731.363.007	(2.620.051.265.427)	(36,30)

Per 30 Juni 2023, Persediaan yang dalam kondisi Rusak sebesar Rp444.556.720,00 dan Rp0,00 (tidak ada) dalam kondisi Usang.

Persediaan dengan kondisi Rusak terdapat pada Satker Direktorat Sarana Transportasi Jalan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Kuantitas	Harga Satuan	Rupiah
Blangko SRUT 2017	2.824	4.300	12.143.200
Blangko SRUT 2018	123.525	3.344	413.067.600
Blangko SRUT 2018	1.584	3.344	5.296.896
Blangko SUT 2018	471	3.344	1.575.024
Blangko SUT 2019	133	33.000	4.389.000
Blangko SUT 2019	245	33.000	8.085.000
Jumlah	128.782		444.556.720

Persediaan Blangko SRUT mengalami kerusakan disebabkan oleh kesalahan/kerusakan dalam proses pencetakan isian Blangko SRUT Rancang Bangun (RB) (proses *print out* isian Blangko SRUT RB).

Terhadap persediaan rusak tersebut, sedang diusulkan untuk proses penghapusan dengan pemusnahan.

Saldo Persediaan Barang Konsumsi sebesar Rp41.150.048.991,00, mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp13.370.836.209,00, diantaranya berasal dari pengadaan Persediaan Barang Konsumsi pada Direktorat Sarana Transportasi Jalan berupa RFID sebesar Rp6.192.283.900,00 dan Kartu BLUe sebesar Rp14.106.341.160,00.

Rincian Persediaan dan Barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

C.9 Tanah

Saldo Tanah per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp2.497.169.036.905,00** dan **Rp2.321.144.264.579,00**. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kode	Uraian Transaksi	Tanah
A	b	c
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	2.321.144.264.579,
101	Pembelian	87.930.906.377,
102	Transfer Masuk	178.093.955.845,
103	Hibah Masuk	167.589.412.821,
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	994.879.710,
107	Reklasifikasi Masuk	15.024.493.100,
112	Perolehan Lainnya	10.665.259.352,
193	Batal Transfer Keluar	17.669.307.482,
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	999.720,
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	6.817.609.690,
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(5.443.694.852,)
302	Transfer Keluar	(195.763.263.327,)
303	Hibah Keluar	(1.168.700.000,)
304	Reklasifikasi Keluar	(15.024.493.100,)
305	Koreksi Pencatatan	(93.087.699.837,)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	1.725.799.345,
921	Internal Transfer Keluar	(6.991.674.015,)
922	Internal Transfer Masuk	6.991.674.015,
	Jumlah	2.497.169.036.905,

Saldo akhir Tanah per 30 Juni 2023 mengalami kenaikan sebesar **Rp176.024.772.326,00** atau 7,58 persen dari saldo per 30 Juni 2022, diantaranya yang signifikan berasal dari transaksi:

1. Migrasi saldo awal aplikasi SAKTI Tahun 2023;
2. Pembelian sebesar Rp87.930.906.377,00 yang terdapat pada satker:
 - a. sebesar Rp20.645.624.869,00 pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan yang merupakan transaksi Pembangunan dan Revitalisasi Terminal Kebumen yang salah menggunakan kode akun barang pada saat pencatatan di Modul Komitmen;
 - b. sebesar Rp26.786867.618,00 pada satker BPTD Wilayah X Provinsi Jateng dan DIY yang merupakan transaksi pembangunan dan revitalisasi Terminal Tipe A Tegal dan Terminal Tipe A Tingkir yang salah menggunakan kode akun barang pada saat pencatatan di Modul Komitmen;

- c. Sebesar Rp36.584.998.150,00 pada satker BPTD Wilayah XXV Provinsi Papua dan Papua Barat yang merupakan transaksi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Klademark, Pembangunan Terminal Barang Internasional Skouw yang salah menggunakan kode barang pada pencatatan di modul komitmen;
 - d. Sebesar Rp3.906.244.700,00 pada Satker BPTD Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan merupakan transaksi pengerasan dan pemadatan Tanah UPPKB Tabalong;
3. Transfer Masuk sebesar Rp178.093.955.845,00 merupakan transaksi masuk aset Tanah Terminal dan UPPKB P3D yang berasal dari Satker Setditjen Perhubungan Darat dengan nilai signifikan terdapat pada:
- a. Sebesar Rp141.599.999.999,00 pada Satker BPTD Wilayah XI Provinsi Jawa Timur merupakan transaksi masuk Tanah Terminal dari Hibah P3D Pemkot Surabaya;
 - b. Sebesar Rp16.541.433.467,00 pada Satker BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara merupakan transaksi transfer masuk Tanah Terminal Tipe A Malalayang;
 - c. Sebesar Rp1.127.874.015,00 pada satker BPTD Kelas II Jawa Tengah;
4. Hibah Masuk sebesar Rp167.589.412.821,00 merupakan transaksi masuk hibah aset P3D berupa Tanah Terminal Tipe A, Tanah UPPKB, dan Pelabuhan Penyeberangan yang diserahkan dari Pemerintah Daerah;
5. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp15.024.493.100,00 yang terdapat pada satker:
- a. Sebesar Rp5.221.564.500,00 pada BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara merupakan transaksi reklasifikasi masuk Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya
 - b. Sebesar Rp9.802.928.600,00 pada BPTD Wilayah V Provinsi Jambi merupakan Transaksi perbaikan pencatatan tanah Terminal Tipe A Alam Barajo;
6. Perolehan Lainnya sebesar Rp10.665.259.352,00 yang terdapat pada Satker:

- a. BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp5.221.564.500,00 merupakan transaksi masuk akibat koreksi pencatatan yang tidak diakomodir melalui menu reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk :
- b. BPTD Wilayah V Provinsi Jambi sebesar Rp5.443.694.852,00 merupakan transaksi masuk akibat koreksi pencatatan yang tidak diakomodir menu reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk;
7. Batal Transfer Keluar sebesar Rp17.669.307.482,00 pada Satker Setditjen Perhubungan Darat yang disebabkan karena adanya kesalahan pemilihan kode Satker Tujuan Transfer Masuk;

Adapun Transaksi Keluar yang secara signifikan memengaruhi saldo Tanah 30 Juni antara lain:

1. Transfer Keluar sebesar Rp195.763.263.327,00 yang terdapat pada:
 - a. Satker Setditjen Perhubungan Darat sebesar Rp188.254.029.327,00 yang merupakan Transaksi Transfer Keluar berupa Tanah Terminal dan Tanah UPPKB hasil P3D kepada Satker BPTD
 - b. Satker BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp7.509.234.000,00 berupa Transfer Keluar Aset Tanah Pelabuhan Tongging, Tanah Pelabuhan Muara, dan Tanah Pelabuhan Balige kepada Satker Penerima KSOP Danau Toba sesuai dengan BA-BPTD-II 147 Tahun 2023 tanggal 30 Juni 2023;
2. Hibah Keluar sebesar Rp1.168.700.000,00 yang terdapat pada:
 - a. Satker BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp427.900.000,00 merupakan Hibah Keluar Tanah UPPKB Simpang Runding kepada Pemda Dairi sesuai dengan Surat KP-BPTD II 43 Tahun 2023
 - b. Satker BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat sebesar Rp740.800.000,00 merupakan Transaksi Hibah Keluar Aset Tanah kepada Pemerintah Daerah Ciamis sesuai dengan SK Penghapusan Nomor KP-BPTD IX 10 Tahun 2023;
3. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp15.024.493.100,00 yang terdapat pada Satker:

- a. BPTD Wilayah V Provinsi Jambi sebesar Rp9.802.928.600,00 merupakan transaksi reklasifikasi keluar aset Tanah Terminal Alam Barajo;
 - b. BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp5.221.564.500,00 merupakan transaksi reklasifikasi keluar Tanah Kosong yang Sudah Diperuntukkan sesuai dengan Surat Keterangan Reklas Nomor SP-BPTD-II 54 Tahun 2023 tanggal 13 Januari 2023;
4. Koreksi Pencatatan sebesar Rp93.087.699.837,00 dengan nilai signifikan terdapat pada:
- a. Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebesar Rp20.645.624.869,00 yang merupakan Koreksi Pencatatan karena kesalahan pemilihan kode barang sesuai dengan Surat Keterangan Koreksi Nomor KP.004/2/14/SDPTJ/2023 dan PL.108/1/18A/DPTJ/V/2023;
 - b. Satker BPTD Wilayah X Provinsi Jateng dan DIY sebesar Rp26.729.267.618,00 yang merupakan Koreksi Pencatatan Tanah Terminal sesuai dengan Surat Keterangan Pencatatan Nomor SKET-BPTDX 104 Tahun 2023 tanggal 10 Maret 2023;
 - c. Satker BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp5.221.264.500,00 yang merupakan Koreksi Pencatatan Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya NUP 7 dan 8 sesuai dengan Surat Keterangan SP-BPTD-II 54 Tahun 2023 tanggal 13 Desember 2023;
 - d. Satker BPTD Wilayah XXV Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp36.584.998.150,00 yang merupakan Koreksi Pencatatan Kesalahan Penginputan Kode Barang Pembangunan TBI Skouw, SPV Pembangunan TBI Skouw Tahap V, dan Koreksi Pencatatan karena kesalahan penginputan kode barang Pelabuhan Penyeberangan Klademark yang tidak dapat dikeluarkan menggunakan menu reklasifikasi keluar;

Rincian Tanah per 30 Juni 2023 dan Rincian Mutasi Tanah per Satuan Kerja terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

C.10 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp10.252.372.389.649,00** dan **Rp9.427.477.452.797,00**. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kode	Uraian Transaksi	Peralatan dan Mesin
<i>a</i>	<i>B</i>	<i>c</i>
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	9.736.175.085.379,
100	Saldo Awal	83.134.158.681,
101	Pembelian	163.633.847.256,
102	Transfer Masuk	213.849.356.003,
103	Hibah Masuk	8.049.896.949,
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	361.210.767.799,
107	Reklasifikasi Masuk	54.864.836.950,
112	Perolehan Lainnya	3.955.706.768.343,
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	85.055.717.476,
193	Batal Transfer Keluar	108.428.761.166,
197	Perolehan Tinjau Normalisasi BMN	13.887.601,
199	Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	1,
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	7.022.966.947,
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	5.554.197.759,
208	Pengembangan Melalui KDP	12.238.771.292,
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(218.428.216,)
299	Normalisasi BMN	9.518.062,
301	Penghapusan	(1.565.720.950,)
302	Transfer Keluar	(336.959.161.205,)
303	Hibah Keluar	(112.861.060.565,)
304	Reklasifikasi Keluar	(54.864.836.950,)
305	Koreksi Pencatatan	(3.995.070.819.202,)
315	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(42.362.272.223,)
369	Penghapusan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	(45.065.754,)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(2.403.042.200,)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	3.774.259.250,
921	Internal Transfer Keluar	(521.533.849,)
922	Internal Transfer Masuk	521.533.849,
	Jumlah	10.252.372.389.649,

Saldo akhir Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp824.894.936.852,00 atau 8,75 persen dari saldo per 30 Juni 2022, diantaranya yang signifikan berasal dari transaksi:

1. Koreksi Saldo Awal senilai total Rp83.134.158.681,00 antara lain merupakan transaksi:
 - a. Sebesar Rp22.185.512.000,00 merupakan saldo awal KMP Pulau Sabu akibat koreksi perbaikan pencatatan;
 - b. Sebesar Rp16.125.686.500,00 merupakan koreksi awal Peralatan dan Mesin berupa Server, Pintu Elektrik, Switch, Televisi, Mini Komputer, Tablet PC, Uninterruptible Power Supply (UPS) sebagai tindak lanjut penghapusan karena normalisasi;
 - c. Sebesar Rp3.806.330.000,00 pada Satker Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan dikarenakan adanya perbaikan nilai dan tahun perolehan Aset berupa Bus Air Samudera Siak dan Bus Air Dolidi Ndano sesuai dengan BASTO;
 - d. Sebesar Rp41.759.248.132,00 merupakan koreksi saldo awal pada BPTD Wilayah VII sebagai tindak lanjut penghapusan karena normalisasi;
2. Pembelian sebesar Rp163.633.847.256,00 dengan nilai signifikan terdapat pada satker:
 - a. Sebesar Rp11.150.351.040,00 pada Satker Direktorat Sarana Transportasi Jalan, dengan nilai signifikan merupakan pengadaan peralatan mesin berupa Mini Bus, Alat Penguji Kendaraan (Mobil Kalibrasi) dan Peralatan Kantor (Printer, Notebook, Meubeleair)
 - b. Sebesar Rp5.095.180.946,00 pada satker Direktorat Lalu Lintas Jalan merupakan pembelian Peralatan Mesin berupa Rambu Jalan dan Peralatan Kantor Lainnya
 - c. Sebesar Rp31.232.873.673,00 pada satker Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan, dengan rincian sebesar Rp18.882.699.093,00 merupakan pengadaan Kapal Penyeberangan Penumpang Ro-Ro 1500 GT Lintas Dompak-Matak, sebesar Rp9.359.892.750,00 merupakan pengadaan Kapal Penyeberangan Ro-Ro 300 GT Lintas Pecah Buyung-Alai

- Isit, dan sebesar Rp1.636.242.250,00 merupakan pengadaan kapal penyeberangan Roro 300 GT Lintas Pecah Buyung-Alai Insit Tahap II, dan sebesar Rp405.130.000,00 merupakan Supervisi pengadaan Kapal Penyeberangan Penumpang Ro-Ro 1500 GT Lintas Dompak-Matak
- d. Sebesar Rp16.138.033.646,00 pada Satker Setditjen Perhubungan Darat merupakan Pembelian berupa Server, Peralatan Komputer, dan Alat Kantor Lainnya;
 - e. Sebesar Rp5.328.116.400,00 pada satker BPLJSKB Bekasi merupakan pengadaan Timbangan Barang, Alat Laboratorium Standardisasi Kalibrasi, Alat Laboratorium Listrik, Personal Komputer, dan Alat Kantor Lainnya;
 - f. Sebesar Rp6.681.185.385,00 pada satker BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat merupakan pengadaan Peralatan Mesin berupa Perlengkapan Jalan, Genset, Alat Komputer, dan Peralatan Kantor Lainnya;
 - g. Sebesar Rp5.288.786.389,00 pada satker BPTD Wilayah X Provinsi Jateng dan DIY merupakan pengadaan Perlengkapan Jalan, Alat Kantor Lainnya, Peralatan Komputer pada Kantor BPTD dan Kantor Satpel Terminal dan UPPKB;
 - h. Sebesar Rp18.053.651.448,00 pada satker BPTD Wilayah XI Provinsi Jawa Timur merupakan pengadaan Automatic Identification System (AIS)/Vessel Tracking Monitoring, Perlengkapan Jalan , Peralatan Personal Komputer, CCTV, Peralatan Video, dan Peralatan Kantor Lainnya;
 - i. Sebesar Rp8.745.079.417,00 pada satker BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten merupakan pengadaan Perlengkapan Jalan, CCTV, Personal Komputer, Alat Kantor Lainnya, dan GPS;
3. Transfer Masuk sebesar Rp213.849.356.003,00 merupakan transaksi Transfer Masuk Aset Terminal dan UPPKB hasil P3D yang berasal dari satker Setditjen Perhubungan Darat kepada satker Penerima (BPTD), serta Transfer Masuk Alat Pengujian Statis pada satker Penerima (BPLJSKB, BPTD Wilayah III, BPTD Wilayah VII, BPTD Wilayah VIII, BPTD Wilayah IX, BPTD Wilayah X, BPTD Wilayah XI, BPTD Wilayah

- XV, dan BPTD Wilayah XVIII) dari satker Pengirim Direktorat Sarana Transportasi Jalan;
4. Sebesar Rp8.049.896.949,00 merupakan transaksi Hibah Masuk Aset P3D yang diserahkan dari Pemerintah Daerah kepada Satker Setditjen Darat. (Rincian Hibah Masuk terlampir);
 5. Sebesar Rp361.210.767.799,00 merupakan Transaksi Penyelesaian Pembangunan dengan KDP, dengan nilai signifikan terdapat pada:
 - a. Sebesar Rp42.006.891.810,00 pada Satker Direktorat Sarana Transportasi Jalan merupakan penyelesaian Pengadaan Alat Penguji Kendaraan (Alat Uji Statis Kendaraan) yang diserahkan kepada satker BPLJSB dan satker BPTD;
 - b. Sebesar Rp9.328.491.600,00 pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan penyelesaian pembangunan Timbangan Jembatan 10 Ton;
 - c. Sebesar Rp40.176.820.881,00 pada Direktorat Lalu Lintas Jalan merupakan Penyelesaian Pembangunan Alat Penerangan Jalan di KSPN Tanjung Lesung, Jalur Selatan dan Utara Pulau Jawa, dan Pembangunan Arterial Transport Management di Jalur Pantura (Indramayu-Brebes);
 - d. Sebesar Rp2.025.261.991,00 pada Satker BPLJSKB Bekasi merupakan pengadaan Engine Stand dan Alat Laboratorium Standardisasi Kalibrasi dan Instrumentasi;
 - e. Sebesar Rp267.673.301.517,00 merupakan penyelesaian pembangunan perlengkapan jalan di Ruas Jalan Nasional pada seluruh Satker BPTD di lingkungan Ditjen Hubdat;
 - f. Satker BPLJSKB Bekasi sebesar Rp4.650.494.850,00 berupa alat uji statis yang berasal dari satker Direktorat Sarana Transportasi Jalan;
 - g. Transfer Masuk aset Terminal Tipe A dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dari Pemerintah Daerah kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat senilai Rp2.353.501.699,00 pada satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

6. Pembelian senilai Rp57.137.133.482,00 diantaranya merupakan transaksi Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran, Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Nasional sebesar Rp5.895.154.165,00;
7. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp54.864.836.950,00 dengan nilai signifikan terdapat pada Direktorat Angkutan Jalan sebesar Rp 16.225.500.000,00 berupa reklasifikasi kode barang micro bus penumpang yang sebelumnya tercatat sebagai bus penumpang. Sebesar Rp31.083.538.148,00 terdapat pada Direktorat Lalu Lintas Jalan dan BPTD Wilayah XXIV berupa Rambu Jalan dan Guardrail yang sebelumnya tercatat sebagai peralatan umum lainnya dan rambu lalu lintas darat lainnya;
8. Perolehan Lainnya sebesar Rp3.955.706.768.343,00 merupakan transaksi yang diakibatkan karena adanya transaksi koreksi pencatatan. Pada aplikasi SAKTI, transaksi reklasifikasi masuk dari jumlah dan nilai barang yang berbeda belum diakomodir. Transaksi Perolehan Lainnya pada Ditjen Perhubungan Darat berupa Transaksi Pemecahan Perlengkapan Jalan. Nilai yang signifikan sebesar Rp3.615.230.659.967,00 terdapat pada BPTD Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur diakibatkan karena adanya kesalahan penginputan nilai transaksi perolehan Perlengkapan Jalan. Satker BPTD Wilayah XIII telah melakukan koreksi atas kesalahan nilai tersebut.
9. Reklasifikasi Masuk dari Persediaan sebesar Rp85.055.717.476,00 yang terdapat pada:
 - a. Sebesar Rp9.836.657.130,00 dan Rp6.889.384.993,00 pada Direktorat Lalu Lintas Jalan dan BPTD Wilayah X Provinsi Jateng dan DIY berupa Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya pada Ruas Jalan Nasional;
 - b. Sebesar Rp17.919.620.000,00 merupakan reklasifikasi Micro Bus yang ditujukan untuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMPP);
 - c. Sebesar Rp47.787.972.825,00 pada Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan berupa KMP Sultan

Murhum II (500GT KalaedupaTomia-Binongko-Wakatbi) dan Bus Air Mappi Dua, Bus Air Danau Tondano, Bus Air Lasang Kilat, dan Bus Air Khatulistiwa Express yang akan diperuntukkan untuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMPP);

10. Batal Transfer Keluar sebesar Rp108.428.761.166,00 dikarenakan adanya kesalahan kode satker penerima;
11. Pengembangan Nilai Aset Langsung sebesar Rp7.022.966.947,00 dengan nilai sebesar Rp316.069.448,00 pada BPLJSKB Bekasi, berupa Alat Penguji Kendaraan Bermotor dan Alat Uji Gas Buang dan sebesar Rp6.706.897.499,00 pada BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten berupa GPS;
12. Pengembangan Dengan KDP sebesar Rp12.238.771.292,00 dengan nilai signifikan sebesar Rp6.877.181.465,00 terdapat pada BPTD Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan berupa Pembangunan ATCS Kota Banjarbaru;
13. Penghapusan sebesar Rp1.565.720.950,00 Direktorat dan Reklasifikasi Keluar sebesar Rp812.050.991.358,00 diantaranya merupakan transaksi:
 - a. Sebesar Rp396.000.000,00 pada Setditjen Perhubungan Darat merupakan transaksi transaksi penghapusan kendaraan dinas yang telah dilakukan penjualan;
 - b. Sebesar Rp246.160.000,00 pada BPTD Wilayah X Provinsi Jateng dan DIY karena penghapusan station wagon dan sepeda motor pada Terminal Tingkir, Terminal Tirtonadi, dan UPPKB Kulwaru yang telah dilakukan penjualan;
 - c. Sebesar Rp375.000.000,00 merupakan penghapusan speed boat karena penjualan dengan SK Penghapusan Nomor PL.404/I/02/BPTDKaltimara/2023 tentang Penghapusan BMN pada Kantor BPTD Wilayah XVII Kaltimara;
 - d. Sebesar Rp1.151.040.950,00 pada BPTD Wilayah XII Provinsi Bali dan NTB merupakan penghapusan karena penjualan BMN berupa Alat Kantor (Meubeleir, Meja Kerja, Televisi, dan Peralatan Lainnya)

14. Transfer Keluar sebesar Rp336.959.161.205,00 dengan nilai signifikan terdapat pada:
- a. Direktorat Sarana Transportasi Jalan sebesar Rp51.460.092.310,00, dengan nilai sebesar Rp51.408.092.310,00 merupakan transfer keluar BMN berupa Alat Uji NonStatis dan Supervisi , dan sebesar Rp52.000.000,00 merupakan transaksi alih status Parkiran Sepeda Selis kepada 17 K/L;
 - b. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebesar Rp25.533.350.785,00 merupakan transaksi keluar Alat Kantor Lainnya (CCTV, Personal Komputer, Meubelair) kepada Satker BPTD Kelas II Jawa Tengah (Aset untuk Terminal dan UPPKB)
 - c. Direktorat Angkutan Jalan sebesar Rp104.086.178.908,00 yang merupakan transaksi penyerahan bus melalui mekanisme alih status aset yang diserahkan kepada Perguruan Tinggi dibawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan sekolah tinggi di bawah Kementerian Agama.
 - d. Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan sebesar Rp332.070.428,00, dengan nilai sebesar Rp49.020.428,00 merupakan transaksi keluar berupa Tablet PC dan Laptop karena adanya mutase pegawai, dan sebesar Rp283.050.000.- merupakan transfer keluar station wagon kepada Direktorat Lalu Lintas Jalan;
 - e. Setditjen Perhubungan Darat sebesar Rp11.609.876.148,00 merupakan transaksi keluar Aset P3D yang diserahkan kepada Satker BPTD Pengelola;
 - f. BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp129.178.155.721,00 merupakan transaksi keluar aset peralatan dan mesin yang diserahkan kepada Satker KSOP Danau Toba;
 - g. BPTD Wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah Sebesar Rp9.250.506.446,00 merupakan transaksi keluar aset yang diserahkan kepada Kantor KSOP Pulang Pisau berupa Moveable Bridge, SBNP Rambu LPJU, dan Genset Dermaga Bahaur

15. Hibah Keluar sebesar Rp112.861.060.565,00 yang terdapat pada satker:
- a. Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan sebesar Rp89.807.080.000,00 merupakan hibah KMP Bahtera Nusantara 02 kepada Pemerintah Provinsi Maluku sesuai dengan BAST Nomor HK.201/7/18/DJPD/2023;
 - b. BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.201.790.315,00 berupa Neraca dengan Digital Display yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis sesuai dengan BAST Nomor BA-BPTD IX 12 Tahun 2023;
 - c. BPTD Wilayah X Provinsi Jateng dan DIY sebesar Rp-Rp2.468.890.000,00 berupa ATCS yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai dengan SK Hapus Nomor SK BPTD-X 127 Tahun 2023;
 - d. BPTD Wilayah III Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp3.477.094.250,00 berupa ATCS Kota Padang yang dihibahkan ke Pemkot Kota Padang;
 - e. BPTD Wilayah XII Provinsi Bali dan NTB sebesar Rp15.015.646.000,00 berupa Hibah ATCS yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar sesuai dengan SK Penghapusan Nomor SK-BPTD-XII 41 Tahun 2023.
 - f. Sebesar Rp591.000.000,00 pada BPTD Wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah berupa Speed Boat yang dihibahkan kepada Pemerintah Kota Palangaraya sesuai dengan SK Nomor SK.036.2/PL.402/BPTDXVI/2023 dan Pemerintah Daerah Seruyan sesuai dengan SK Nomor SK.030/PL.402/BPTDXVI/2023;
16. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp54.864.836.950,00 dengan nilai signifikan terdapat pada:
- a. Direktorat Angkutan Jalan sebesar Rp16.225.500.000,00 berupa Reklasifikasi Bus;
 - b. Direktorat Lalu Lintas Jalan sebesar Rp13.461.780.148,00 berupa reklasifikasi Rambu Jalan dan Peralatan Umum Lainnya;

- c. BPTD Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp17.621.758.000,00 berupa reklasifikasi Rambu-rambu Lalu Lintas Darat Lainnya;
 - d. BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp4.562.690.000,00 berupa reklasifikasi Alat Penguji Kendaraan Bermotor Lainnya;
17. Koreksi Pencatatan senilai Rp3.995.070.819.202,00. Koreksi Pencatatan diantaranya merupakan transaksi reklasifikasi aset berupa perlengkapan jalan sesuai dengan Perdirjen Perhubungan Darat Nomor KP.5238/PL.201/DRJD/2019 yang tidak dapat diakomodir melalui menu transaksi reklasifikasi masuk dan reklasifikasi keluar pada aplikasi SAKTI. Selain itu nilai koreksi pencatatan yang signifikan disebabkan adanya kesalahan pemilihan kode akun barang pada Modul Komitmen.
18. Reklasifikasi Aset ke Persediaan sebesar Rp42.362.272.223,00 merupakan transaksi perbaikan pencatatan persediaan yang menggunakan mata anggaran 52 yang sebelumnya tercatat sebagai aset tetap dengan nilai signifikan terdapat pada:
- a. Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan sebesar Rp30.810.615.093,00 berupa Pembangunan dan Supervisi Kapal Penumpang Lintas Pecah Buyung-Alai Insit, Kapal Penumpang Dompok-Matak-Penagi, dan Kapal Penumpang Lintas Bombana-Tanjung Pising;
 - b. Direktorat Lalu Lintas Jalan berupa Pengadaan Bantek Perlengkapan Jalan;
 - c. BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat berupa Pengadaan Bantek Perlengkapan Jalan;
19. Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp2.403.042.200,00 pada Direktorat Sarana Transportasi Jalan merupakan penghentian aset dalam rangka proses penghapusan kendaraan dinas;

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.5238/PL.201/DRJD/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Perlengkapan Jalan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, telah dilakukan

penyesuaian pencatatan terhadap aset Perlengkapan Jalan per unit sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan cara melakukan Reklasifikasi Keluar dan Reklasifikasi Masuk.

Marka Jalan, Paku Jalan, Patok Lalin, dan Pita Penggaduuh dilakukan koreksi pencatatan untuk dibebankan sebagai Beban Barang dan selanjutnya dianggarkan menggunakan Belanja Non Operasional Lainnya sesuai dengan SE Bagan Akun Nomor SE-DRJD Nomor 7 Tahun 2022.

C.11 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp5.225.923.012.860,00** dan **Rp4.095.896.949.002.00**. Mutasi transaksi Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kode	Uraian Transaksi	Gedung dan Bangunan
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	3.787.199.316.420,
100	Saldo Awal	34.228.022.699,
101	Pembelian	177.318.432.610,
102	Transfer Masuk	634.136.741.883,
103	Hibah Masuk	30.497.927.352,
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1.002.580.149.958,
107	Reklasifikasi Masuk	224.317.439.943,
112	Perolehan Lainnya	401.722.867.056,
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	1.385.522.208,
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	71.900.003.690,
193	Batal Transfer Keluar	3.632.560.021,
197	Perolehan Tinjutan Normalisasi BMN	11.348.979,
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	197.150.000,
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	303.078.479.350,
208	Pengembangan Melalui KDP	229.585.728.232,
214	Koreksi Susulan	19.357.151.749,
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(58.295.340.532,)
302	Transfer Keluar	(641.617.554.904,)
303	Hibah Keluar	(10.543.697.551,)
304	Reklasifikasi Keluar	(214.374.893.343,)
305	Koreksi Pencatatan	(725.399.526.494,)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(47.262.824.466,)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	2.268.008.000,
921	Internal Transfer Keluar	(136.222.725.800,)
922	Internal Transfer Masuk	136.222.725.800,

Kode	Uraian Transaksi	Gedung dan Bangunan
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
	Jumlah	5.225.923.012.860,

Saldo akhir Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.130.026.063.858,00 atau 27,59 persen dari saldo per 30 Juni 2022, transaksi yang mempengaruhi antara lain:

1. Koreksi Saldo Awal merupakan Koreksi saldo awal pada satker Setditjen Perhubungan Darat senilai Rp34.228.022.699,00 dengan nilai signifikan terdapat pada:
 - a. Satker BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp22.423.007.199,00
 - b. Satker BPTD Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepulauan Riau sebesar Rp2.916.540.000,00 merupakan pencatatan saldo awal Gedung Bangunan UPPKB Muara Lembu;
 - c. Satker BPTD Wilayah V Provinsi Jambi sebesar Rp2.855.117.000,00 merupakan pencatatan saldo awal Gedung Pelawan Sarolangun;
 - d. Satker BPTD Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebesar Rp8.274.791.000,00 merupakan transaksi tindak lanjut normalisasi yang diinput sebagai saldo awal;
2. Pembelian sebesar Rp177.318.432.610,00 dengan nilai yang signifikan terdapat pada:
 - a. BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp42.885.533.352,00 merupakan Peningkatan Pelabuhan Teluk Dalam, Pelabuhan Sipinging, Pelabuhan Gunung Sitoli;
 - b. BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat sebesar Rp28.352.973.234,00 merupakan transaksi pembangunan dan revitalisasi Terminal Tipe A Banjar;
 - c. BPTD Kelas II Jawa Tengah sebesar Rp11.753.681.306,00 merupakan transaksi Revitalisasi Terminal Bobot Sari dan Pengadaan Bangunan Halte Shelter;
 - d. BPTD Wilayah XI Provinsi Jawa Timur sebesar Rp20.045.559.013,00 merupakan transaksi revitalisasi Terminal

- Tipe A Kertonegoro Ngawi, Peningkatan UPPKB Guyangan, dan Pengadaan Bangunan Penerangan Jalan;
- e. BPTD Wilayah XII Provinsi Bali dan NTB sebesar Rp23.102.435.134,00 dengan nilai yang signifikan merupakan transaksi Pembangunan Pelabuhan Bias Munjul;
 - f. BPTD Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp10.772.655.500,00 berupa Pembangunan Terminal Nanga Badau Tahap IV;
 - g. BPTD Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp14.056.157.112,00 merupakan transaksi Peningkatan Dermaga Sungai Gampa Tahap II, Dermaga Sungai Pasar Lima Tahap III, Dermaga Desa Pendalaman Baru Tahap II, dan Supervisi;
3. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp1.002.580.149.958,00 dengan nilai signifikan terdapat pada:
- a. Sebesar Rp36.075.087.216,00 pada BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat berupa Revitalisasi Terminal Tipe A Banjar;
 - b. Sebesar Rp68.264.892.285,00 pada BPTD Kelas II Jawa Tengah berupa Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Borobudur, Revitalisasi Terminal Tipe A Tegal, Terminal Tipe A Tingkir;
 - c. Sebesar Rp89.499.130.014,00 pada BPTD Wilayah XI Provinsi Jawa Timur berupa Revitalisasi Terminal Tipe A Tamanan Kediri dan Revitalisasi Terminal Tipe A Blitar;
 - d. Sebesar Rp81.628.377.800,- pada BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara berupa Revitalisasi Terminal Tipe A Tanjung Pinggir dan Terminal Tipe A Amplas, dan Dermaga Sipanggan;
 - e. Sebesar Rp61.710.147.999,00 pada BPTD Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri merupakan Revitalisasi UPPKB Muara Lembu dan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Mengkapan Tahap II;
 - f. Sebesar Rp102.610.337.424,00 pada BPTD Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat Pembangunan Show Case Terminal

- Entikong dan Supervisi, Pembangunan Terminal Nanga Badau Tahap dan Supervisi.
- g. Sebesar Rp159.102.293.023,00 pada BPTD Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara berupa Rehabilitasi dan Peningkatan Terminal Tipe A Puuwatu Tahap I-III, Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kadatua, Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Siompu;
 - h. Sebesar Rp148.220.547.510,00 pada BPTD Wilayah XII Provinsi Bali dan NTB berupa Pembangunan Dermaga Bedugul Tabanan, Pembangunan Dermaga Pelabuhan Kuburan dan Kadisan, Pembangunan Pelabuhan Bias Munjul, Pembangunan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda di KSPN Mandalika.
 - i. Sebesar Rp67.377.386.310,00 pada BPTD Wilayah XXIV Provinsi Maluku Utara berupa Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Weda dan Supervisi, Pembangunan Gedung Kantor dan Supervisi;
 - j. Sebesar Rp49.447.373.000,00 pada BPTD Wilayah XVII Provinsi Kalimantan Timur dan Utara berupa Revitalisasi Terminal Tipe A Samarinda Seberang;
4. Reklasifikasi masuk sebesar Rp224.317.439.943,00 diantaranya terdapat pada satker:
- a. BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat sebesar Rp61.567.554.800,00 berupa bangunan gedung kantor permanen yang sebelumnya tercatat sebagai gedung terminal lainnya;
 - b. BPTD Kelas II Jawa Tengah sebesar Rp60.886.927.543,00 berupa reklasifikasi gedung terminal Kebumen;
 - c. BPTD Wilayah XII Provinsi Bali dan NTB sebesar Rp91.920.411.000,00 berupa reklasifikasi Pelabuhan Sampalan karena kesalahan kode barang;
5. Perolehan Lainnya sebesar Rp401.722.867.056,00 merupakan transaksi tindak lanjut dari koreksi pencatatan karena kesalahan kode barang yang tidak dapat diakomodir dengan menu Reklasifikasi

Masuk dan Keluar. Perolehan Lainnya diantaranya terdapat pada Satker:

- a. BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp49.357.306.696,00
 - b. BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat sebesar Rp35.642.599.596,00
 - c. BPTD Kelas II Jawa Tengah sebesar Rp125.254.324.464,00
 - d. BPTD Wilayah XII Provinsi Bali dan NTB sebesar Rp112.041.462.353;
 - e. BPTD Wilayah XIII Provinsi NTT sebesar Rp71.677.003.690,00
6. Reklasifikasi Rp71.900.003.690,00 yang terdapat pada satker BPTD Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa reklasifikasi Aset SBNP Kalabahi dan Raijua yang dioperasikan oleh BPTD;
7. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Rp303.078.479.350,00 yang terdapat pada:
- a. BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat sebesar Rp55.809.668.096,00 merupakan koreksi penambahan nilai pada Terminal Tipe A Leuwi Panjang;
 - b. BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp186.929.607.583,00; merupakan transaksi kapitalisasi dan penambahan nilai aset Bangunan Terminal Kebumen, Terminal Tipe A Tirtonadi, Terminal Mbangun Desa Cilacap, Terminal Tipe A Bulupitu Banyumas.
 - c. BPTD Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp44.234.043.286,00.
8. Pengembangan melalui KDP sebesar Rp229.585.728.232,00 yang terdapat pada:
- a. Sebesar Rp151.387.709.349,00 merupakan pengembangan Terminal Barang Internasional Skouw dan Pelabuhan Penyeberangan Klademark;
 - b. Sebesar Rp34.370.503.388,00 merupakan Transaksi Pengembangan Rehab Dermaga Penyeberangan Likupang dan Lanjutan Pengembangan Terminal Tipe A Bolaang Mongandow;

9. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp58.295.340.532,00 dengan nilai signifikan terdapat pada:
- BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat sebesar Rp38.832.059.131,00
 - BPTD Wilayah X Provinsi Jateng dan DIY sebesar Rp16.645.850.450,00
 - BPTD Wilayah XXV Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp2.679.900.000,00
10. Transfer Keluar sebesar Rp641.617.554.904,00 dengan nilai signifikan terdapat pada:
- Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebesar Rp504.480.877.224,00 yang merupakan transfer keluar berupa Revitalisasi Terminal Tipe A Kebumen dan Revitalisasi Terminal Tipe A Tirtonadi sesuai dengan Surat Keterangan PL.108/19/SDPTJ/2023
 - BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp98.120.470.833,00 merupakan transfer keluar aset Pelabuhan Penyeberangan yang berada dalam wilayah kewenangan Satker KSOP Danau Toba;
 - Setditjen Perhubungan Darat sebesar Rp35.294.723.160,00 merupakan transfer keluar Aset P3D yang diserahkan ke 8 (delapan) satker BPTD.
11. Hibah Keluar Rp10.543.697.551,00 dengan nilai signifikan terdapat pada satker:
- BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp811.136.334,00 berupa Hibah Keluar Pemkab Dairi berupa Bangunan UPPKB Simpang Runding sesuai dengan SK Nomor KP-BPTD-II 43 Tahun 2023 tanggal 31 Oktober 2023
 - BPTD Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp785.000.000,00 berupa SBNP Hansisi yang diserahkan kepada Pemkab Kupang;
 - BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.724.399.217,00 berupa Hibah Bangunan UPPKB

- Sindangrasa yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Ciamis sesuai dengan BAST Nomor HK.201/20/6/DJPD/2023;
- d. BPTD Wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp2.038.605.000,00 berupa Hibah Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen Kepada Pemerintah Barito Selatan sesuai dengan SK Hapus Nomor SK.034./PL.402/BPTDXVI/VIII/2023 dan Hibah Keluar Bangunan Gudang Tertutup Permanen yang diserahkan kepada Pemda Katingan sesuai dengan SK Hapus Nomor SK.025.1/PL.404/BPTDXVI/2021
 - e. BPTD Wilayah XVII Provinsi Kalimantan Timur dan Utara sebesar Rp4.184.557.000,00 berupa Hibah Keluar Bangunan Dermaga Sungai Sebuku yang dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan sesuai dengan BAST Hibah Nomor HK/201/12/10/DJPD/2023;
12. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp214.374.893.343,00 dengan rincian terdapat pada:
- a. BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat sebesar Rp61.567.554.800,00 berupa bangunan gedung kantor permanen yang sebelumnya tercatat sebagai gedung terminal lainnya;
 - b. BPTD Kelas II Jawa Tengah sebesar Rp60.886.927.543,00 berupa reklasifikasi gedung terminal Kebumen;
 - c. BPTD Wilayah XII Provinsi Bali dan NTB sebesar Rp91.920.411.000,00 berupa reklasifikasi Pelabuhan Sampalan karena kesalahan kode barang;
13. Koreksi Pencatatan sebesar Rp725.399.526.494,00 dengan nilai signifikan terdapat pada:
- a. BPTD Wilayah III Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp18.068.652.219,00 yang merupakan koreksi perbaikan pemilihan kode barang di modul komitmen pada transaksi Revitalisasi UPPKB Lubuk Selasih dan Pembangunan Pelabuhan Teluk Bungus;
 - b. BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat sebesar Rp72.958.381.496,00 merupakan perbaikan pencatatan kode

barang akibat kesalahan pemilihan kode akun di modul komitmen pada transaksi Pembangunan Terminal Tipe A Leuwi Panjang;

- c. BPTD Wilayah X Provinsi Jateng dan DIY sebesar Rp307.308.414.393,00 merupakan perbaikan pencatatan kode barang pada anak satker Terminal Tipe A Kebumen, Terminal Tipe A Mendolo Wonosobo, Terminal Tipe A Tirtonadi, Terminal Tipe A Ir Soekarno, Terminal Tipe A Banyumas dan Terminal Tipe A Dhaksinarga;
- d. BPTD Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp81.797.289.975,00 merupakan perbaikan pencatatan dan pemecahan aset Halte Sungai, an Rehab Pelabuhan Penyeberangan Seba yang akan dikapitalisasi ke aset induk, dan Pemecahan Aset menjadi aset Pelabuhan Penyeberangan Nangakeo, Pelabuhan Penyeberangan Aimere, Pelabuhan Penyeberangan Teluk Gurita dan Waingapu.

14. Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp47.262.824.466,00, dengan nilai yang signifikan terdapat pada:

- a. BPTD Wilayah III Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp1.127.130.000,00 merupakan transaksi penghentian Bangunan Gedung UPPKB Lubuk Selasih dan UPPKB Rantau Baringin;
- b. BPTD Wilayah XI Provinsi Jawa Timur sebesar Rp15.890.158.982,00 yang merupakan transaksi penghentian aset Terminal Tipe A Patria Blitar yang dihapuskan melalui mekanisme lelang;
- c. BPTD Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp22.321.492.455,00 merupakan transaksi penghentian aset Pelabuhan Penyeberangan Nagakeo yang dihapuskan melalui mekanisme lelang;

15. Internal Transfer Masuk dan Transfer Keluar sebesar Rp136.222.725.800,00 terdapat pada satker BPTD Wilayah X Provinsi Jateng dan DIY, yang merupakan transaksi Masuk dan Transaksi Keluar antara Kode Satker Induk dan Kode anak Satker;

C.12 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp2.522.300.363.896,00** dan **Rp2.673.427.283.243,00**. Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN				
Jalan dan jembatan	1.125.475.260.240	1.111.482.787.523	13.992.472.717	1,26
Irigasi	1.356.303.176.068	1.523.075.686.283	(166.772.510.215)	(10,95)
Jaringan	40.521.927.588	38.868.809.437	1.653.118.151	4,25
Jumlah	2.522.300.363.896	2.673.427.283.243	(151.126.919.347)	(5,65)

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kode	Uraian Transaksi	Jalan, Irigasi dan Jaringan
<i>a</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	2.673.427.283.243,
100	Saldo Awal	76.240.169.938,
101	Pembelian	95.149.067.384,
103	Hibah Masuk	99.455.979.974,
102	Transfer Masuk	99.455.979.974,
107	Reklasifikasi Masuk	336.718.144.017,
112	Perolehan Lainnya	141.610.726.933,
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	7.168.737.000,
193	Batal Transfer Keluar	1.324.294.735,
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	54.106.663.709,
302	Transfer Keluar	(390.916.939.945,)
303	Hibah Keluar	(147.262.943.080,)
304	Reklasifikasi Keluar	(343.710.455.617,)
305	Koreksi Pencatatan	(557.153.992.069,)
315	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(16.947.531.027,)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(200.311.422,)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	139.295.962.913,
921	Internal Transfer Keluar	(1.324.294.735,)
922	Internal Transfer Masuk	1.324.294.735,
	Jumlah	2.522.300.363.896,

Saldo akhir Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2023 mengalami penurunan sebesar Rp151.126.919.347,00 atau 5,65 persen dari saldo per 30 Juni 2022, diantaranya berasal dari transaksi:

1. Koreksi Saldo Awal sebesar Rp76.240.169.938,00 yang terdapat pada 2 (dua) satker yakni BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp76.090.169.938,00 dan satker bPTD Wilayah IV Provinsi Riau Kepri dengan nilai sebesar Rp150.000.000,00
2. Pembelian sebesar Rp95.149.067.384,00 yang terdapat pada satker:
 - a. BPLJSKB Bekasi sebesar Rp334.400.000;
 - b. BPTD Wilayah XI sebesar Rp13.742.879.000,00
 - c. BPTD Wilayah XV sebesar Rp 4.627.759.050
 - d. BPTD Wilayah XVIII sebesar Rp13.986.326.921,00
 - e. BPTD Wilayah XXV sebesar Rp44.668.581.590,00

Saldo Pembelian Aset JIJ yang muncul dikarenakan adanya kesalahan penginputan pada modul komitmen. Operator modul komitmen salah menginput kode barang (menjadi pembelian aset tetap) yang seharusnya menjadi konstruksi dalam pengerjaan. Operator modul aset mengikuti kode barang yang telah dipilih oleh operator modul komitmen, meskipun kesalahan kode barang pada akhirnya dilakukan perbaikan pencatatan melalui menu koreksi pencatatan dan diinput kembali menggunakan kode barang KDP melalui menu transaksi KDP perolehan lainnya.

3. Hibah masuk sebesar Rp99.455.979.974,00 merupakan Hibah Aset P3D yang diserahkan kepada Pemerintah Pusat melalui Setditjen Perhubungan Darat;
4. Transaksi Masuk sebesar Rp99.455.979.974,00 merupakan Transaksi Masuk Aset P3D pada 6 (enam) satker BPTD yang berasal dari Satker Setditjen Perhubungan Darat;
5. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp336.718.144.017,00 merupakan transaksi tindak lanjut dari reklasifikasi keluar yang terdapat pada satker:
 - a. BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp179.846.620.045,00 merupakan reklasifikasi masuk akibat koreksi pemecahan aset Bangunan Dermaga Pelabuhan;

- b. BPTD Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Babel sebesar Rp156.871.523.972,00 merupakan reklasifikasi masuk Dermaga Tanjung Nyato.
- 6. Hibah Aset P3D yang diserahkan kepada Pemerintah Pusat melalui Setditjen Perhubungan Darat;
- 7. Perolehan lainnya sebesar Rp141.610.726.933,00 dengan nilai signifikan sebesar Rp129.847.461.132,00 pada BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara merupakan transaksi tindak lanjut dari koreksi pencatatan karena kesalahan kode barang yang tidak dapat diakomodir dengan menu Reklasifikasi Masuk dan Keluar;
- 8. Reklasifikasi Masuk dari Persediaan sebesar Rp7.168.737.000,00 pada Satker BPTD Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Babel berupa bangunan Dermaga Sungai Lumpur;
- 9. Transfer Keluar sebesar Rp390.916.939.945,00 terdapat pada satker:
 - a. Setditjen Perhubungan Darat sebesar Rp100.780.274.709,00 yang merupakan Aset P3D yang diserahkan kepada BPTD;
 - b. BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp254.539.527.236,00 yang merupakan transfer keluar Aset Pelabuhan Penyeberangan kepada Kantor KSOP Danau Toba;
 - c. BPTD Wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp35.597.138.000,00 merupakan transfer keluar aset Dermaga Bahaur kepada KSOP Pulang Pisau;
- 10. Hibah Keluar sebesar Rp147.262.943.080,00 dengan nilai signifikan terdapat pada:
 - a. BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat sebesar Rp495.238.317,00 berupa Jembatan Timbang yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Ciamis;
 - b. BPTD Wilayah XI Provinsi Jawa Timur sebesar Rp31.587.791.000,00 berupa Hibah Dermaga Bawean kepada Pemkab Gresik;
 - c. BPTD Wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp42.385.285.213,00 berupa Dermaga dan Pelabuhan Penyeberangan yang diserahkan kepada Pemda Katingan, Dishub Kapuas, dan Pemda Kotawaringin Timur;

- d. BPTD Wilayah XVII Provinsi Kalimantan Timur dan Utara sebesar Rp16.734.998.000,00 berupa Dermaga Sungai Sebuksu (Pemkab Nunukan) dan Dermaga Sungai Kayan (Pemkab Bulungan);
 - e. BPTD Wilayah XXV Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp47.346.514.550,00 merupakan hibah pelabuhan dan Dermaga yang diserahkan kepada Pemkab Teluk Wondama dan Pemkab Mimika;
11. Koreksi Pencatatan sebesar Rp557.153.992.069,00 merupakan koreksi perbaikan pencatatan aset dikarenakan kesalahan kode barang. Koreksi Pencatatan dengan nilai signifikan terdapat pada:
- a. Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan sebesar Rp59.887.546.000,00 merupakan koreksi pencatatan tindak lanjut normalisasi K3 aset dermaga yang tercatat ganda pada aplikasi SIMAK BMN, sebesar Rp8.618.269.252,00 merupakan koreksi pencatatan BMN sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat Jenderal Kemenhub atas temuan kesalahan pencatatan aset pada saat likuidasi dan telah disetujui oleh Kemenkeu sesuai dengan Surat Nomor S-3/WKN.7/KNL.01/2023 tanggal 04 Januari 2023;
 - b. BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp99.907.040.279,00 merupakan koreksi pemecahan Aset Pelabuhan Penyeberangan Ambarita yang tidak dapat diakomodir menggunakan menu reklasifikasi masuk dan keluar; sebesar Rp179.846.620.045,00 merupakan koreksi Pemecahan Aset pada Dermaga Penyeberangan Tongging, Bakara, Muara, dan Balige;
 - c. BPTD Wilayah XXIV Provinsi Maluku Utara sebesar Rp66.003.197.150,00 merupakan koreksi pencatatan aset dermaga karena double catat;
 - d. BPTD Wilayah XXV Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp44.668.581.590,00 merupakan koreksi pencatatan Pelabuhan Penyeberangan Salawati, Pelabuhan Penyeberangan

Klademark, dan Pelabuhan Batanta yang akan dikapitalisasikan ke dalam aset induk

12. Reklasifikasi Keluar ke Persediaan sebesar Rp16.947.531.027 pada BPTD Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Babel
13. Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp200.311.422,00 pada BPTD Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri berupa Penghapusan Bangunan Gedung UPPKB Rantau Beringin;
14. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebesar Rp139.295.962.913,00 dengan nilai signifikan terdapat pada:
 - a. Sebesar Rp66.003.197.150,00 pada BPTD Wilayah XXIV Provinsi Maluku Utara merupakan transaksi reklasifikasi keluar Aset lainnya menjadi Aset Tetap berupa Dermaga. Aset Dermaga tersebut tercatat secara ganda (pada Aset dan Persediaan) sehingga perlu dilakukan koreksi pencatatan.
 - b. Sebesar Rp31.587.791.000,00 pada BPTD Wilayah XI Provinsi Jawa Timur merupakan Reklasifikasi Dermaga Bawean;
 - c. Sebesar Rp12.874.811.213,00 merupakan reklasifikasi Dermaga Muara Taweh;
 - d. Sebesar Rp 20.117.047.550,00 terdapat pada BPTD Wilayah XXV Provinsi Papua dan Papua Barat berupa Dermaga Penyeberangan Kokonao.

C.13 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp235.601.757.898,00** dan **Rp292.310.019.918,00**. Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Rincian Aset Tetap Lainnya per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET TETAP LAINNYA				
Aset Tetap Renovasi	222.932.656.637	281.418.846.109	(58.486.189.472)	(20,78)
Aset Tetap Lainnya	12.669.101.261	10.891.173.809	1.777.927.452	16,32
Jumlah	235.601.757.898	292.310.019.918	(56.708.262.020)	(19,40)

Aset Tetap Lainnya terdiri dari Aset Tetap Renovasi dan Aset Tetap Lainnya. Saldo akhir Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2023 mengalami penurunan sebesar Rp56.708.262.020,00 atau 19,40 persen dari saldo per 30 Juni 2022.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Renovasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kode	Uraian Transaksi	Aset Tetap Renovasi
a	b	c
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	281.418.846.109,
100	Saldo Awal	2.766.255.000,
101	Pembelian	570.179.928,
303	Hibah Keluar	(53.788.771.000,)
304	Reklasifikasi Keluar	(2.950.235.000,)
305	Koreksi Pencatatan	(5.083.618.400,)
921	Internal Transfer Keluar	(6.647.565.472,)
922	Internal Transfer Masuk	6.647.565.472,
	Jumlah	222.932.656.637,

Mutasi Aset Tetap Renovasi diantaranya berasal dari transaksi:

1. Koreksi Saldo Awal sebesar Rp2.766.255.000,00 pada BPTD Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
2. Pembelian sebesar Rp570.179.928,00 diantaranya terdapat pada BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat yang merupakan pengadaan Tanaman Hias, Laporan dan Peta Digital;
3. Hibah Keluar sebesar Rp53.788.771.000,00 dengan rincian:
 - a. Sebesar Rp199.183.000,00 pada BPTD Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat berupa Hibah Pekerjaan Rehab Dermaga Kayong Utara;

- b. Sebesar Rp53.589.588.000,00 pada BPTD Wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah berupa Hibah Aset Rehab Dermaga Pasar Lama kepada Pemda Barito Selatan;

Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kode	Uraian Transaksi	Aset Tetap Lainnya
<i>a</i>	<i>B</i>	<i>c</i>
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	10.891.173.809,
101	Pembelian	1.877.362.452,
102	Transfer Masuk	500.000,
103	Hibah Masuk	500.000,
302	Transfer Keluar	(500.000,)
304	Reklasifikasi Keluar	(99.935.000,)
	Jumlah	12.669.101.261,

Rincian Aset Tetap Renovasi per 30 Juni 2023 dan Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per Satuan Kerja terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

C.14 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp1.060.561.327.993,00** dan **Rp1.117.789.445.907,00**. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan
per 30 Juni 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
BPTD Wilayah II	86.317.672.640	30.100.000.000	56.217.672.640	186,77%
BPTD Wilayah III	13.411.626.640	0	13.411.626.640	

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
BPTD Wilayah IV	30.836.168.099	17.796.000.000	13.040.168.099	73,28%
BPTD Wilayah V	3.018.010.710	0	3.018.010.710	
BPTD Wilayah VII	108.680.813.875	71.322.357.712	37.328.594.000	52,34%
BPTD Wilayah VIII	25.180.666.517	0	25.180.666.517	
BPTD Wilayah IX	0	25.049.522.450	(25.049.522.450)	(100,00%)
BPTD Wilayah XI	1.4579.971.210	62.914.725.413	(48.334.754.203)	(76,83%)
BPTD Wilayah XII	23.526.584.700	126.793.314.370	(103.266.729.670)	(81,44%)
BPTD Wilayah XIII	201.205.548.349	121.870.797.599	79.334.750.750	
BPTD Wilayah XIV	139.058.592.781	207.248.148.913	(68.189.556.132)	(32,90%)
BPTD Wilayah XV	31.370.672.093	20.944.956.000	10.425.716.093	49,78%
BPTD Wilayah XVI	7.030.741.000	0	7.030.741.000	-
BPTD Wilayah XVII	111.325.552.188	64.246.296.405	47.079.255.783	73,28%
BPTD Wilayah XVIII	0	83.713.268.900	(83.713.268.900)	(100,00%)
BPTD Wilayah XIX	16.168.092.100	41.337.639.100	(25.169.547.000)	(60,89%)
BPTD Wilayah XX	0	13.623.405.400	(13.623.405.400)	(100,00%)
BPTD Wilayah XXII	0	25.392.440.632	(25.392.440.632)	(100,00%)
BPTD Wilayah XXIII	81.647.810.041	68.703.024.193	12.944.785.848	18,84%
BPTD Wilayah XXIV	14.082.973.960	26.026.749.830	(11.943.775.870)	(45,89%)
BPTD Wilayah XXV	122.107.658.783	93.706.798.390	28.400.860.393	30,31%
BPTD (BPTD) Kelas II Jawa Tengah	31.042.034.470	17.000.000.600	14.042.033.870	82,60%
Jumlah	1.060.561.327.993	1.117.789.445.907	(57.228.117.914)	(5,12%)

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2023 terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

C.15 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp(8.242.427.207.692,00)** dan **Rp(7.130.432.846.819,00)**. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
per 30 Juni 2023
(dalam rupiah)*

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	2	3	4	5
1	Peralatan dan Mesin	10.252.372.389.649	7.086.107.885.976	3.166.264.503.673
2	Gedung dan Bangunan	5.225.923.012.860	558.794.339.697	4.667.128.673.163
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.522.300.363.896	597.502.982.019	1.924.797.381.877
4	Aset Tetap Lainnya	235.601.757.898	22.000.000	235.579.757.898
Total		18.236.197.524.303	8.242.427.207.692	9.993.770.316.611

C.16 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp860.934.350.143,00** dan **Rp987.312.585.138,00**. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Aset Tak Berwujud
per 30 Juni 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET TAK BERWUJUD				
Patent	0	0	0	0
Software	27.383.676.100	44.089.527.334	(16.705.851.234)	(37,89)
Lisensi	588.676.250	588.676.250	0	0
Hasil Kajian/Penelitian	523.732.837.011	540.762.418.164	(17.029.581.153)	(3,15)
Aset Tak Berwujud Lainnya	309.229.160.782	401.871.963.390	(92.642.802.608)	(23,05)
Jumlah	860.934.350.143	987.312.585.138	(126.378.234.995)	(12,80)

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kode	Uraian Transaksi	Aset Tak Berwujud
a	B	c
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	987.312.585.138,
100	Saldo Awal	3.529.616.000,
101	Pembelian	12.835.515.599,
102	Transfer Masuk	6.682.598.745,
103	Hibah Masuk	420.200.870,
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	51.641.201.732,
107	Reklasifikasi Masuk	185.937.400,
112	Perolehan Lainnya	8.682.175.046,
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	147.351.164,
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	49.922.000,
301	Penghapusan	(21.558.538.950,)
302	Transfer Keluar	(6.682.598.745,)
304	Reklasifikasi Keluar	(86.002.400,)
305	Koreksi Pencatatan	(161.119.563.856,)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(21.106.049.600,)
	Jumlah	860.934.350.143,

Saldo akhir Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2023 mengalami penurunan sebesar Rp126.378.234.995,00 atau 12,8 persen dari saldo per 30 Juni 2022, diantaranya yang signifikan berasal dari transaksi:

1. Koreksi Saldo Awal sebesar Rp3.529.616.000,00 pada satker BPTD Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan berupa Penginputan saldo

- awal Hasil Kajian dan Aset Tak Berwujud Lainnya sebagai tindak lanjut input tindak lanjut normalisasi;
2. Pembelian sebesar Rp12.835.515.599,00 dengan nilai signifikan terdapat pada:
 - a. Direktorat Lalu Lintas Jalan sebesar Rp1.380.998.000,
 - b. Direktorat Transportasi, Sungai, Danau dan Penyeberangan sebesar Rp1,889.755.618,00
 - c. Setditjen Perhubungan Darat sebesar Rp2.747.307.895,00
 - d. BPTD Wilayah XXI Provinsi Gorontalo sebesar Rp1.525.475.052,00
 - e. BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp1.180.000,00
 3. Penyelesaian Pembangunan melalui KDP sebesar Rp51.641.201.732,00 dengan nilai signifikan terdapat pada:
 - a. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebesar Rp8.109.807.600,00
 - b. Direktorat Angkutan Jalan sebesar Rp18.276.595.737,00
 - c. Setditjen Perhubungan Darat sebesar Rp11.804.949.345,00
 4. Penghapusan sebesar Rp21.558.538.950,00 pada Satker:
 - a. Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan sebesar Rp18.349.688.550,00 yang merupakan penghapusan Aset Tak Berwujud berupa Hasil Kajian dan DED yang sudah tidak relevan sesuai dengan Surat Persetujuan Penghapusan Nomor PL.404/10/11/TSDP/XII/2023 dan PL.404/11/11/TSDP/XII/2023;
 - b. BPTD Kelas II Jawa Tengah sebesar Rp3.208.850.400,00 yang merupakan penghapusan DED dan Studi Faskes yang sudah tidak relevan sesuai dengan Surat Persetujuan Menkeu S-81/MK.6/KNL.0902/2023

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2023 dan Mutasi Aset Tak Berwujud per Satker terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

C.17 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp1.177.663.893.730,00** dan **Rp1.660.871.735.920,00**. Aset Lain-Lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta dalam proses penghapusan dari BMN. Rincian Aset Lain-lain per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Aset Lain-Lain
per 30 Juni 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET LAIN-LAIN				
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah	1.097.642.453.630	1.580.275.670.920	(482.633.217.290)	(30,54)
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah	80.021.440.100	80.596.065.000	(574.624.900)	(0,71)
Jumlah	1.177.663.893.730	1.660.871.735.920	(483.207.842.190)	(29,09)

Mutasi transaksi terhadap Aset Lain-Lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kode	Uraian Transaksi	Aset Lainnya
a	B	c
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	1.660.871.735.920,
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(147.064.029.508,)
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	49.866.178.088,
192	Transfer Masuk (Henti Guna)	4.056.283.500,
301	Penghapusan	(85.104.444.651,)
392	Transfer Keluar (BMN Yang Dihentikan)	(4.056.283.500,)
393	Hibah Keluar (BMN Yang Dihentikan)	(245.772.028.351,)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	21.106.049.600,
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(76.831.917.368,)
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	592.350.000,
	Jumlah	1.177.663.893.730,

Saldo akhir Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2023 mengalami penurunan sebesar Rp 483.207.842.190,00 atau -29,09 persen dari saldo per 30 Juni 2022, diantaranya yang signifikan berasal dari transaksi:

1. Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap senilai Rp147.064.029.508,00 diantaranya merupakan transaksi pada Satker:
 - a. Direktorat Sarana Transportasi Jalan;
 - b. Direktorat Lalu Lintas Jalan;
 - c. Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
 - d. BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat;
 - e. BPTD Wilayah XIII Provinsi NTT;
 - f. BPTD Wilayah XX Provinsi Sulawesi Tengah; dan
 - g. BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta (403869).
2. Hibah Keluar (BMN Yang Dihentikan) senilai Rp245.772.028.351,00 diantaranya terdapat pada:
 - a. Direktorat Sarana Transportasi Jalan sebesar Rp592.350.000,00 berupa Hibah Kendaraan Keselamatan Sosialiasi Zeta yang diserahkan kepada Pemkot Surakarta;
 - b. BPTD Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepulauan Riau sebesar Rp26.670.964.000,00 berupa Hibah Dermaga Sei Selari yang diserahkan kepada Pemkab Bengkalis;
 - c. BPTD Kelas II Jawa Tengah sebesar Rp29.479.649.000,00 berupa Hibah Aset:
 - 1) Rehab Dermaga Pulau Panjang di Kabupaten Jepara;
 - 2) Rehab Dermaga Penyeberangan Jepara;
 - 3) Rehab Dermaga Kapal Cepat Kendal
 - 4) Rehab Dermaga Tritis dan Dermaga Wadaslintang di Kab. Wonosobo;
 - 5) Aset Dermaga dan Speed Boat Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri;
 - 6) Rehab Dermaga Sleko di Kabupaten Cilacap;
 - 7) Pekerjaan Breakwater di Kabupaten Jepara;

- d. BPTD Wilayah XVII Provinsi Kaltimara sebesar Rp182.083.814.351 merupakan Hibah Keluar Aset Dermaga Simanggaris, Dermaga Sebatik, dan Dermaga Sei Jepun yang diserahkan kepada Pemkab Nunukan sesuai dengan BAST Nomor pl.301/1/10.1/BPTD-KALTIMRA/2023; dan hibah keluar ATCS dan Rambu Jalan yang diserahkan kepada Pemkot Samarinda sesuai dengan BAST Nomor PL.301/I/20/BPTD-KALTIMTARA/2023:

Rincian Aset Lain-lain per 30 Juni 2023 terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

C.18 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp(528.468.468.941,00)** dan **Rp(646.749.694.264,00)**.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
per 30 Juni 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	2	3	4	5
1	Aset Tak Berwujud	860.934.350.143	19.072.432.996	841.861.917.147
2	Aset Lain-Lain	1.177.663.893.730	509.396.035.945	668.267.857.785
Total		2.038.598.243.873	528.468.468.941	1.510.129.774.932

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan terhadap ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.19 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp535.498.660,00** dan **Rp472.781.000,00**.

Rincian Utang Pihak Ketiga per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
UTANG KEPADA PIHAK KETIGA				
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayara	6.385.500	232.375.000	(225.989.500)	(97,25)
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayara	485.996.060	240.406.000	245.590.060	102,16
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	43.117.100	0	43.117.100	0
Jumlah	535.498.660	472.781.000	62.717.660	13,27

Uraian Utang kepada Pihak Ketiga pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar, terdapat pada:
BPTD Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp6.385.500,00 merupakan Belanja Barang Persediaan Konsumsi yang belum dicairkan sampai dengan 30 Juni 2023.
2. Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar, terdapat pada:
BPTD Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp485.996.060,00 merupakan keuarangan pembayaran atas Paket Pekerjaan Pembangunan Lokasi Rawan Kecelakaan APJ dan Pekerjaan Peningkatan Pelabuhan Sungai Rasau Jaya.
3. Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya, terdapat pada:
Direktorat Angkutan Jalan sebesar Rp 43.117.100,00 merupakan kekurangan pembayaran belanja barang Paket *Meeting Fullboard*.

C.20 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp454.548.990,00**. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.21 Ekuitas

Saldo Ekuitas per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp19.729.940.820.886,00** dan **Rp22.026.261.145.825,00**. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp1.205.587.062.860,00** dan **Rp1.434.666.571.630,00**. Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar **15,97** persen dibandingkan dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2022. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pendapatan PNB		
Pendapatan Jasa Layanan Umum		
Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	7.765.470.127	0
Jumlah Pendapatan Jasa Layanan Umum	7.765.470.127	0
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan BMN		
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	5.936.611.458	1.670.243.213
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	382.480	0
Pendapatan dari KSP Tanah Gedung dan Bangunan	73.963.814	0
Pendapatan Pemanfaatan BMN Lainnya	15.082.500	76.032.000
Jumlah Pendapatan dari Pengelolaan BMN	6.026.040.252	1.746.275.213
Pendapatan Jasa		
Pendapatan Pengujian Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	70.643.900.000	66.117.000.000
Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	1.089.892.124.000	1.341.149.510.000
Pengembalian Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	(7.219.508.932)	(472.055.000)
Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	5.021.646.252	4.688.183.475
Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran	13.035.500	0
Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	3.039.755.000	1.254.290.000
Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	21.267.710.502	10.251.040.000
Pendapatan Jasa Lainnya	9.507.280	0
Jumlah Pendapatan Jasa	1.182.668.169.602	1.422.987.968.475
Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan		
Pendapatan Bunga Lainnya	54.888	0
Jumlah Pendapatan Denda	54.888	0
Pendapatan Denda		
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	7.546.039.380	9.691.402.484
Jumlah Pendapatan Denda	7.546.039.380	9.691.402.484
Pendapatan Lain-Lain		
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	1.500.000
Pendapatan Anggaran Lain-lain	1.581.288.611	239.425.458
Jumlah Pendapatan Lain-Lain	1.581.288.611	240.925.458
Jumlah	1.205.587.062.860	1.434.666.571.630

Terdapat selisih antara Pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional senilai **Rp44.457.414.806,00**. Hal tersebut disebabkan karena Pengakuan Pendapatan yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah sedangkan Pendapatan yang dilaporkan dalam Laporan Operasional berbasis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp499.842.490.713,00** dan **Rp433.799.162.888,00**.

*Perbandingan Rincian Beban Pegawai
untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	% Naik (Turun)
Beban Gaji Pokok PNS	186.464.198.398	168.044.820.570	0,11
Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0	(4.471.400)	(1,00)
Beban Pembulatan Gaji PNS	2.898.865	2.650.175	0,09
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	(18.063)	(1,00)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	13.565.400.728	13.505.151.814	0,00
Beban Tunj. Anak PNS	3.949.504.372	3.986.832.557	(0,01)
Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	0	(1.021.908)	(1,00)
Beban Tunj. Struktural PNS	2.013.590.000	2.381.605.000	(0,15)
Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	(1.065.000)	(1,00)
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.005.494.000	356.740.000	1,82
Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	(355.000)	(1,00)
Beban Tunj. PPh PNS	1.035.610.781	1.251.778.652	(0,17)
Beban Tunj. Beras PNS	11.585.751.350	10.902.311.760	0,06
Pengembalian Beban Tunjangan Beras PNS	0	(941.460)	(1,00)
Beban Uang Makan PNS	30.395.873.950	28.841.486.000	0,05
Pengembalian Beban Uang Makan PNS	0	(1.230.250)	(1,00)
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	219.060.000	161.060.000	0,36
Beban Tunjangan Umum PNS	10.262.345.000	8.687.160.000	0,18
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	(20.172.000)	(1,00)
Beban Uang Lembur	15.159.774.000	10.447.226.900	0,45
Pengembalian Beban Uang Lembur	0	(800.000)	(1,00)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	224.182.989.269	185.480.235.101	0,21
Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	(219.820.560)	(1,00)
Jumlah	499.842.490.713	433.799.162.888	0,15

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp75.067.299.626,00** dan **Rp71.918.384.560,00**.

*Perbandingan Rincian Beban Persediaan
untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	% Naik (Turun)
Beban Persediaan Konsumsi	74.707.951.427	69.489.521.141	7,51
Beban Persediaan Pita Cukai Materai dan Leges	0	0	0
Beban Persediaan Bahan Baku	201.111.217	2.047.094.205	(90,18)
Beban Persediaan Lainnya	158.236.982	381.769.214	(58,55)
Jumlah	75.067.299.626	71.918.384.560	4,38

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp2.200.391.296.984,00** dan **Rp1.972.355.046.172,00**. Beban Barang dan Jasa pada 30 Juni 2022 mengalami kenaikan sebesar **11,56** persen dibandingkan dengan 30 Juni 2022.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa
untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	% Naik (Turun)
Beban Keperluan Perkantoran	231.454.648.339	222.243.012.621	4,14
Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	0	(14.593.277)	(100,00)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	19.394.380.001	15.834.883.460	22,48
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.436.855.304	1.533.064.867	(6,28)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	16.702.663.531	18.562.911.000	(10,02)
Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	(38.160.000)	(100,00)
Beban Barang Operasional Lainnya	133.976.658.175	108.861.550.350	23,07
Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	0	(1.530.000)	(100,00)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	32.935.901.857	36.678.672.297	(10,20)
Pengembalian Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	(12.720)	(100,00)
Beban Bahan	14.082.260.844	13.065.317.182	7,78
Beban Honor Output Kegiatan	81.490.398.293	78.883.766.874	3,30
Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	0	(65.520.000)	(100,00)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.507.638.267.718	1.200.719.992.850	25,56
Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	(2.103.000)	(100,00)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	10.862.561.113	127.671.161.849	(91,49)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabe	500.066.000	0	0
Beban Langganan Listrik	23.902.712.405	16.874.731.963	41,65
Pengembalian Beban Langganan Listrik	0	(10.549.139)	(100,00)
Beban Langganan Telepon	3.590.031.494	3.215.797.895	11,64
Beban Langganan Air	1.733.687.511	1.422.748.514	21,85
Pengembalian Beban Langganan Air	0	(1.789.295)	(100,00)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	15.538.481.335	12.447.560.659	24,83
Pengembalian Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	(3.737.644)	(100,00)
Beban Jasa Konsultan	1.704.438.168	1.501.330.900	13,53
Beban Sewa	80.179.444.171	77.549.942.531	3,39
Beban Jasa Profesi	6.043.831.753	9.690.739.700	(37,63)
Beban Jasa Lainnya	12.668.506.103	13.088.366.724	(3,21)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	3.170.748.590	12.020.283.491	(73,62)
Beban Jasa	12.000.000	0	0
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	1.285.841.279	627.205.520	105,01
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin - BLU	86.913.000	0	0
Jumlah	2.200.391.296.984	1.972.355.046.172	11,56

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp146.421.126.052,00** dan **Rp193.861.201.069,00**.

Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan
untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	% Naik (Turun)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	78.549.452.237	80.463.338.864	(2,38)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	55.000.000	579.990.650	(90,52)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	62.642.704.630	108.102.950.606	(42,05)
Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	(70.410.000)	(100,00)
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	1.980.822.445	1.619.680.517	22,30
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	99.500.000	(100,00)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	146.793.000	194.819.900	(24,65)
Beban Pemeliharaan Lainnya	1.184.285.295	1.846.563.566	(35,87)
Pengembalian Beban Pemeliharaan Lainnya	0	(2.201.100)	(100,00)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1.387.893.625	826.668.510	67,89
Beban Persediaan suku cadang	257.523.907	189.100.656	36,18
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	216.650.913	11.198.900	1.834,57
Jumlah	146.421.126.052	193.861.201.069	(24,47)

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp207.445.713.666,00** dan **Rp191.777.053.745,00**.

Rincian Beban perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa
untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	% Naik (Turun)
Beban Perjalanan Biasa	161.628.597.633	147.877.670.711	9,30
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	(46.765.000)	(100,00)
Beban Perjalanan Tetap	584.910.597	694.823.605	(15,82)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.623.414.358	2.468.506.619	6,28
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13.994.812.646	9.202.796.099	52,07
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	2.100.000	1.017.673.900	(99,79)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	24.672.433.228	30.384.961.811	(18,80)
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	3.036.023.304	177.386.000	1.611,53
Beban Perjalanan	903.421.900	0	0
Jumlah	207.445.713.666	191.777.053.745	8,17

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp2.601.307.294.083,00** dan **Rp407.835.822.380,00**.

*Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat
untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	% Naik (Turun)
Beban Persediaan Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	159.193.425.302	186.938.879.259	(14,84)
Beban Persediaan Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	70.190.228.397	188.158.895.521	(62,70)
Beban persediaan Jalan Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	109.627.328.940	32.738.047.600	234,86
Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	189.993.540	-	-
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	2.262.106.317.904	-	-
Jumlah	2.601.307.294.083	407.835.822.380	537,83

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp1.321.017.774.505,00** dan **Rp1.362.999.235.588,00**.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	% Naik (Turun)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	987.105.272.101	1.019.339.938.837	(3,16)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	96.805.776.052	110.745.588.188	(12,59)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	39.320.258.085	33.135.074.559	18,67
Beban Penyusutan Irigasi	132.723.345.971	109.133.232.975	21,62
Beban Penyusutan Jaringan	1.368.413.195	1.292.229.988	5,90
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	5.500.000	(100,00)
Beban Amortisasi Software	4.875.434.350	9.067.983.341	0
Beban Amortisasi Lisensi	58.867.625	58.867.625	0
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	19.528.775	19.528.775	0
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	58.740.878.351	80.201.291.300	(26,76)
Jumlah	1.321.017.774.505	1.362.999.235.588	(3,08)

D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**.

D.10 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	% Naik (Turun)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	2.361.384.908	2.024.926.579	16,62
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	(639.468.054.754)	(411.457.763.919)	55,42
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya	43.858.644.178	38.336.564.196	14,40
Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya	(2.289.559.190)	(36.755.576)	6.129,15
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(595.537.584.858)	(371.133.028.720)	60,46

E. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp22.026.261.145.825,00** dan **Rp21.381.983.527.128,00**.

E.2 SURPLUS (DEFISIT) – LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar **Rp6.441.443.517.627,00** dan **Rp3.571.012.363.492,00**. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 KOREKSI YANG MENAMBAH (MENGURANGI) EKUITAS

E.4.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 sebesar **Rp0,00**.

E.4.2 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.4.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp6.921.977.690,00** dan **Rp(341.638.622.549,00)**. Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Rincian Nilai Koreksi Nilai Persediaan

Nama Satker	Nilai	Keterangan
Direktorat Lalu Lintas Jalan	566.298.690,	Koreksi Nilai Tambah atas Reklasifikasi Masuk Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2023
BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat	49.955.000,	Koreksi Keluar atas barang yang ada di BAST berupa Bantuan Teknis Alat Penerangan Jalan di Kabupaten Pangandaran-SPV pada modul Persediaan
BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta	54.000,	Koreksi Nilai Tambah atas Koreksi Hasil Migrasi Bantek Perlengkapan Jalan Penghubung Jalan Nasional di Kota Surakarta
BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara	1.440.030.000,	Koreksi Nilai Tambah Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Utara TA. 2022 dan 2023
BPTD Wilayah XXIII Provinsi Maluku	4.865.640.000,	Koreksi Nilai Tambah atas Terminal Passo Tahun 2015
Jumlah	6.921.977.690,	

E.4.4 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp(6.933.253.954,00)** dan **Rp1.165.245.808.006,00**. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan selisih nilai reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk atas persediaan, aset tetap dan aset lainnya.

Rincian Nilai Transaksi Koreksi atas Reklasifikasi

Nama Satker	Nilai
Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	(6.990.054.125,)
BPTD Wilayah VII	338.950.620,
BPTD Wilayah IX	0,
BPTD Wilayah X	(198.787.949,)

Nama Satker	Nilai
BPTD Wilayah XIII	(83.362.500,)
Jumlah	(6.933.253.954,)

E.4.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**

E.4.6 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar **Rp(160.364.767.396,00)** dan **Rp(613.158.283.932,00)**.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi terdiri dari Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi senilai Rp(37.150.709.587,00) dan Rp(123.214.057.809,00).

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan perbaikan atas kesalahan pencatatan nilai aset, antara lain disebabkan: kesalahan pemilihan kode barang dan/atau akun pada saat BAST Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya pada Modul Komitmen.

E.4.7 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar **Rp(1.989.442.156,00)** dan **Rp(245.538.166.530,00)**. Koreksi lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Rincian Nilai Transaksi Koreksi Lainnya

Nama Satker	Nilai	Keterangan
Direktorat Sarana Transportasi Jalan	2.328.292.000,	Koreksi Nilai Piutang PNB dan Penyisihan Piutang PNB SRUT Hasil Reviu Keempat
Direktorat Lalu Lintas Jalan	(390.793.000,)	Koreksi Nilai Belanja Yang Masih Harus Dibayar (Utang)

Nama Satker	Nilai	Keterangan
BPTD Wilayah I Provinsi Aceh	24.270.980,	Koreksi Piutang Liannya atas Pengembalian Belanja Rehabilitasi Terminal Tipe A Langsa dan Terminal Tipe A Paya Ilang
BPTD Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	(72.195,)	Koreksi Nilai Penyisihan Piutang Lainnya atas Pengembalian Belanja Peningkatan Pelabuhan Sungai 16 Ilir
BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat	(165.750,)	Koreksi Nilai Penyisihan Piutang Lainnya atas Pengembalian Belanja Ketatalaksanaan Operasional dan Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan di Terminal Guntur Melati berbasis <i>Excel Service</i>
BPTD Wilayah XI Provinsi Jawa Timur	27.910.121,	Koreksi Nilai Penyisihan Piutang Lainnya atas Pengembalian Belanja Revitalisasi Terminal Tipe A Tamanan Kediri
Jumlah	1.989.442.156,	

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp4.307.488.678.504,00** dan **Rp4.250.379.247.194,00**. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN maupun K/L dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	5.282.027.700.232
Diterima dari Entitas Lain	(1.242.111.059.405)
Transfer Keluar	(1.328.479.021.155)
Transfer Masuk	1.289.851.415.913
Pengesahan Hibah Langsung	306.199.642.919
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0
Jumlah	4.307.488.678.504

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua/lebih entitas yang berbeda, baik internal Kementerian/Lembaga, antar Kementerian/Lembaga, maupun Kementerian/Lembaga dengan Bendahara Umum Negara (BUN). Transaksi antar Entitas terdiri dari:

1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan dan Belanja yang melibatkan Kas Negara (BUN);
2. Transaksi Transfer Masuk dan Transfer Keluar merupakan transaksi perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BA BUN;
3. Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengesahan hibah langsung tahun berjalan, pengesahan pengembalian hibah langsung dan pengesahan hibah langsung tahun anggaran yang lalu dalam bentuk kas, barang, maupun jasa/surat berharga.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2022, DDEL sebesar **Rp1.242.111.059.405,00** sedangkan DKEL sebesar **Rp5.282.027.700.232,00**.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L dan antara K/L dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 sebesar **Rp1.289.851.415.913,00**. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 sebesar **Rp1.328.479.021.155,00**.

Transfer Masuk dan Transfer Keluar memiliki nilai yang cukup besar, diantaranya merupakan:

1. Pemindahan pencatatan aset Terminal Penumpang Tipe A dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dari satker

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kepada Balai Pengelola Transportasi Darat;

2. Pemindahan pencatatan aset Pelabuhan Penyeberangan dan Kapal dari BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba;
3. Transfer Blanko Tilang dan Blanko SPB dari Direktorat Lalu Lintas Jalan dan Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan kepada Balai Pengelola Transportasi Darat.

Terdapat selisih transaksi Transfer Keluar dan Transfer Masuk sebesar **Rp38.627.605.424,00**, merupakan perpindahan aset dari satu entitas ke entitas lain pada Eselon 1 lain dan Kementerian lain, yaitu dari transaksi:

1. Transfer Keluar (alih status) Rak Parkiran Sepeda (Selis) dari Direktorat Sarana Transportasi Jalan, dengan rincian:
 - a. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebesar Rp4.000.000,00;
 - b. Sekretariat Kementerian, Sekretariat Negara sebesar Rp6.000.000,00;
 - c. Sekretariat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp2.000.000,00;
 - d. Sekretariat Jenderal, Kementerian Luar Negeri sebesar Rp4.000.000,00;
 - e. Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan sebesar Rp2.000.000,00;
 - f. Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan sebesar Rp2.000.000,00;
 - g. Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp4.000.000,00;
 - h. Biro Umum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp2.000.000,00;
 - i. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp2.000.000,00;

- j. Sekretariat Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebesar Rp4.000.000,00;
 - k. Sekretariat Kementerian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp2.000.000,00;
 - l. Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebesar Rp2.000.000,00;
 - m. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp4.000.000,00;
 - n. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp4.000.000,00;
 - o. Badan Pertanahan Nasional sebesar Rp2.000.000,00;
 - p. Sekretariat Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp4.000.000,00; dan
 - q. RRI Jakarta sebesar Rp2.000.000,00.
2. Transfer Keluar (alih status) Bus Sekolah dari Direktorat Angkutan Jalan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dengan rincian:
 - a. Universitas Lambung Mangkurat sebesar Rp1.031.120.000,00;
 - b. Institut Seni Indonesia Padangpanjang sebesar Rp663.000.000,00;
 - c. Universitas Tidar sebesar Rp663.000.000,00;
 - d. Universitas Mulawarman sebesar Rp515.560.000,00;
 - e. Politeknik Negeri Ujung Pandang sebesar Rp1.002.037.040,00;
 - f. Politeknik Negeri Sambas sebesar Rp495.300.110,00.
 3. Transfer Keluar (alih status) Bus Sekolah dari Direktorat Angkutan Jalan kepada Kementerian Agama, dengan rincian:
 - a. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari sebesar Rp493.970.440,00; dan
 - b. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebesar Rp514.550.000,00.
 4. Transfer Keluar Blanko Tilang dari Direktorat Lalu Lintas Jalan kepada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebesar Rp37.475.000,00; dan
 5. Transfer Keluar Pelabuhan Penyeberangan Bahaur dari BPTD Wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah kepada Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pulau Pisang sebesar Rp48.695.897.446,00.

Rincian Transfer Masuk dan Transfer Keluar sampai dengan 30 Juni 2023 terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 sebesar **Rp306.199.642.919,00**.

Pengesahan Hibah Langsung berasal dari Hibah Masuk Aset Terminal Tipe A dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dari Pemerintah Daerah kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

E.5 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp19.729.940.820.886,00** dan **Rp22.026.261.145.825,00**.

F. PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Penetapan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor sebagai Instansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat, produktifitas dan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi serta praktek bisnis yang sehat, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengusulkan pembentukan Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Pada Tahun 2023 Kementerian Keuangan, melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 392/KMK.05/2023 tanggal 23 September 2023, telah menetapkan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

F.2 Pembentukan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan (KSOPP) Danau Toba

Guna mewujudkan keselamatan dan keamanan kegiatan angkutan penyeberangan di Kawasan Danau Toba, telah dibentuk unit kerja baru Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2023.

F.3 Hasil Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan

Berdasarkan Catatan Hasil Reviu atas Laporan Hasil Pemeriksaan PIPK tingkat UAPPA-Eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, terdapat beberapa kelemahan yang masih harus ditindaklanjuti yaitu:

- a. Terdapat Persediaan yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda senilai Rp47.293.975.111. Direktorat Lalu Lintas Jalan telah mengirimkan surat konfirmasi dan permintaan kelengkapan data dukung untuk proses usulan hibah senilai Rp47.293.975.111 kepada para penerima hibah, untuk selanjutnya terus berkoordinasi terkait pemenuhan kelengkapan data dukung dan mengajukan usulan hibah kepada Sekretariat Jenderal

Kementerian Perhubungan dan/atau Kementerian Keuangan, sesuai dengan kewenangannya.

- b. Terdapat Aset Tak Berwujud senilai Rp736.230.000,00 pada Direktorat Lalu Lintas yang masih bermanfaat berupa Reviu Pembangunan Gedung Laboratorium Perlengkapan Jalan. Aset Tak Berwujud tersebut akan dilakukan Transfer Keluar oleh Direktorat Lalu Lintas kepada Direktorat Sarana Transportasi Jalan pada Tahun 2023;
- c. Terdapat Aset Tak Berwujud senilai Rp288.513.000,00 yang masih harus diajukan usulan Penetapan Status Penggunaan (PSP) kepada Sekretariat Jenderal untuk kemudian diajukan penghapusan karena aset sudah tidak bermanfaat.

F.4 Kerja Sama Pemanfaatan Operasional (KSPO) Pelabuhan Penyeberangan Ajibata-Ambarita di Danau Toba

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan operasional pada Pelabuhan di Kawasan Pariwisata Danau Toba, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan Kerja Sama Pemanfaatan Operasional pada Barang Milik Negara di Pelabuhan Penyeberangan Ajibata dan Pelabuhan Ambarita di Kawasan Danau Toba pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.

Perjanjian KSPO BMN dilaksanakan antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dengan PT. ASDP Indonesia Ferry, sesuai Akta Notaris Perjanjian Kerja Nomor: 08.-

Perjanjian Kerja Sama tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Keuangan Nomor S-36/MK.6/2023 tanggal 24 Januari 2023 perihal Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan Operasional Barang Milik Negara Pelabuhan Ajibata dan Ambarita di Kawasan Danau Toba pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Kementerian Perhubungan.

Mitra KSPO	PT. ASDP Indonesia Ferry
Jangka Waktu Pemanfaatan	25 tahun
Kontribusi Mitra kepada Negara	1. Kontribusi tetap tahun pertama minimal sebesar Rp73.963.814,00, dengan kenaikan sebesar 1,78% per tahun, yang dibayarkan setiap tahun oleh Mitra KSPO 2. Pembagian keuntungan KSPO minimal 70,67% dari Laba Bersih.

Daftar BMN yang dilaksanakan KSPO

**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
YANG DISETUJUI UNTUK DILAKUKAN KERJA SAMA PEMANFAATAN OPERASIONAL**

No	Kode Barang	NUP	Jenis BMN	Uraian Barang	Lokasi	Tahun Perolehan	Luas (m²)	Nilai Wajar (Rp)	Jangka Waktu
Pelabuhan Ajibata									
1	2.01.02.02.002	1	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	Tanah Pelabuhan Ajibata		2015	10.448	9.548.878.000,00	25 tahun
2	5.02.04.06.007	2	Bangunan Dermaga	a. Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/ Bandara Permanen	Jalan Justin Sirait, Desa Pardamean Ajibata, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara	2020	2.056	19.186.296.000,00	
				b. Gedung Pos Jaga Permanen		2019	10	21.101.000,00	
				c. Gedung Pos Jaga Permanen		2020	10	21.781.000,00	
				d. Gedung Pos Jaga Permanen		2020	24	68.042.000,00	
				e. Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)		2020	43	150.408.000,00	
				f. Bangunan Rumah Genset		2020	43	165.516.000,00	
				g. Bak Penampung/Kolam/Menara Penampungan		2020	9	161.565.000,00	
				h. Gedung Pos Jaga Permanen		2020	9	24.902.000,00	
				i. Bak Penampung/Kolam/Menara Penampungan		2020	6	254.045.000,00	
				j. Bak Penampung/Kolam/Menara Penampungan		2020	14	38.579.000,00	
				k. Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Lainnya		2020	280	830.116.000,00	

No	Kode Barang	NUP	Jenis BMN	Uraian Barang	Lokasi	Tahun Perolehan	Luas (m²)	Nilai Wajar (Rp)	Jangka Waktu
				l. Bangunan Dermaga	Jalan Justin Sirait, Desa Pardamean	2020	861	46.841.442.000,00	25 tahun
				m. Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Ajibata, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara	2020	1.359	333.265.000,00	
				n. Bangunan Parkir Terbuka Permanen		2020	4.451	6.119.004.000,00	
				o. Taman Permanen		2020	574	91.617.000,00	
Pelabuhan Ambarita									
3	5.02.04.06.007	3	Bangunan Dermaga	a. Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/ Bandara Permanen	Desa Ambarita, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samsosir, Provinsi Sumatera Utara	2020	1.542	20.857.886.000,00	25 tahun
				b. Bangunan Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar Lainnya		2020	99	237.034.000,00	
				c. Bangunan Dermaga		2020	948	67.057.392.000,00	
Jumlah								172.008.869.000,00	

F.5 Kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) *Proving Ground* pada Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB)

Pembangunan pengujian kendaraan bermotor berstandar ASEAN MRA melalui Kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) *Proving Ground*, bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas kendaraan untuk keselamatan dan kelaikan jalan;
2. Melestarikan lingkungan dari pencemaran akibat emisi kendaraan;
3. Menyelaraskan persyaratan teknis produk otomotif antar negara ASEAN;
4. Meningkatkan ekspor melalui Persetujuan Jenis produk otomotif yang saling mengakui ASEAN.

Penanggung Jawab Proyek (PJPK)	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat – Kementerian Perhubungan
CAPEX	Rp 1,98 triliun
Project IRR	8,89 %

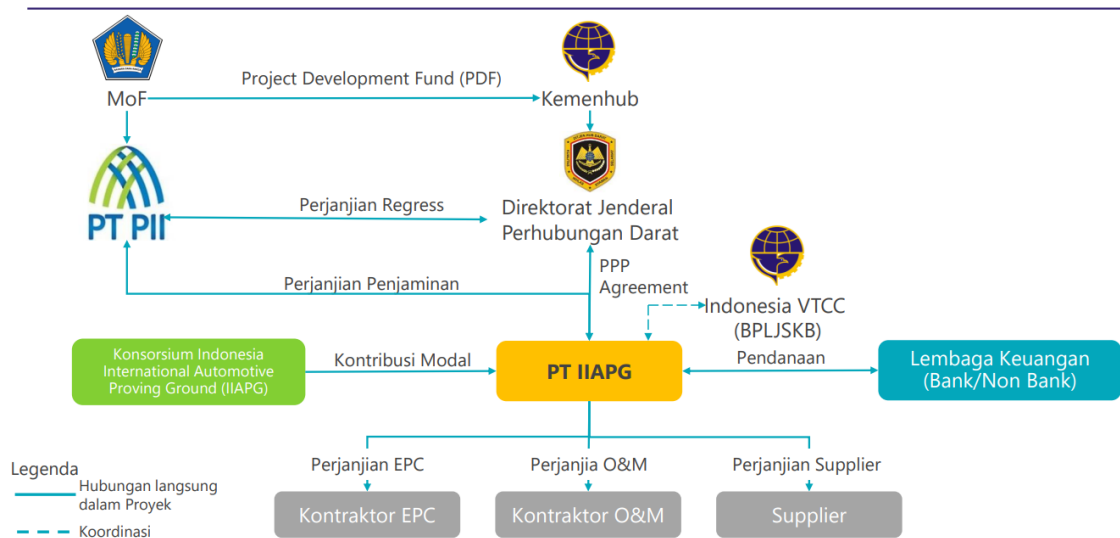
Approx. AP	Rp 339,9 miliar per tahun
Area Coverage	BPLJSKB area di Bekasi
Periode Kerjasama	17 tahun (2 tahun periode konstruksi dan 15 tahun periode <i>Operating and Maintenance</i>)
Lingkup Kerjasama	1. Merancang dan pembangunan Fasilitas Pengujian dan Fasilitas Penunjang 2. Pengadaan Peralatan Pengujian dan Fasilitas Penunjang 3. Pemeliharaan Fasilitas 4. Peningkatan kapasitas SDM (pelatihan)
Skema KPBU	Design Build Finance Maintenance Transfer (DBFMT); pengembalian investasi melalui <i>Availability Payment</i> (AP)

Lingkup Proyek KPBU

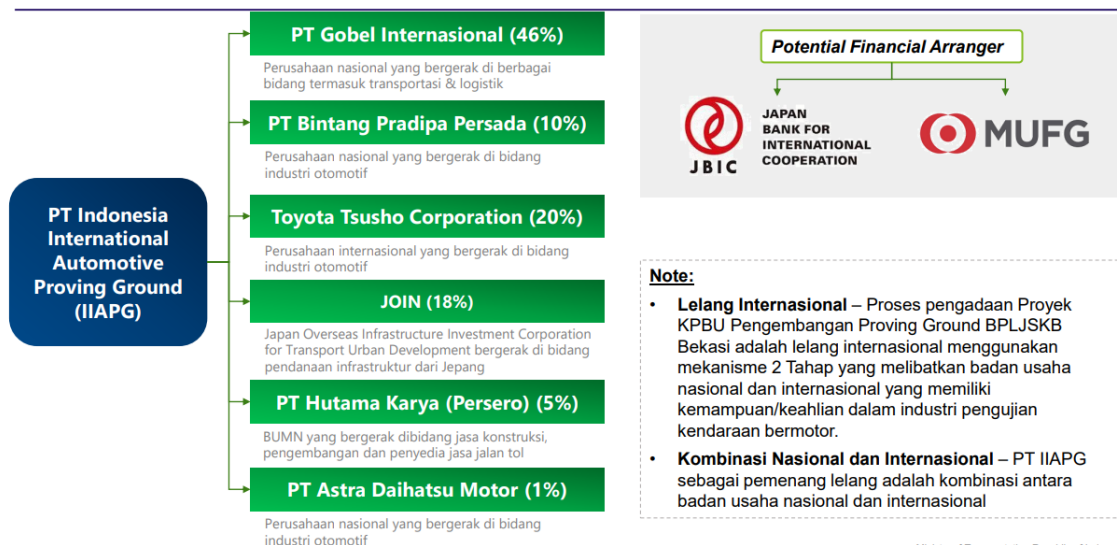


Layanan	Desain	Membangun	Pendanaan	Pemeliharaan	Operasi	Transfer
Peralatan Pengujian	✓	✓	✓	✓		✓
Fasilitas Pengujian	✓	✓	✓	✓		✓
Fasilitas Pendukung	✓	✓	✓	✓		✓
Sistem Informasi Manajemen Proving Ground	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pelatihan	✓		✓		✓	

Struktur Proyek KPBU



Profil Anggota PT IIAPG



F.6 Pelimpahan Kewenangan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Proses Pelimpahan Kewenangan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) bidang transportasi darat berupa Terminal Tipe A dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) per tanggal 30 Juni 2022, adalah sebagai berikut:

a. Terminal Tipe A

Sudah Register	Proses Peralihan	Verifikasi Aset	Inventarisasi Awal	Tidak Diserahkan	Kewenangan BPTJ	Total Terminal Tipe A
107	3	2	4	20	9	145

Dari 145 Terminal Tipe A, terdapat 107 Terminal Tipe A yang telah diserahkan kepada Kementerian Perhubungan dan telah tercatat sebagai aset Kementerian Perhubungan c.q Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagaimana terlampir, 3 Terminal Tipe A dalam proses peralihan menjadi BMN, 2 Terminal Tipe A masih pada tahap proses verifikasi aset. Selanjutnya, terdapat 4 Terminal Tipe A yang sedang pada proses inventarisasi awal dimana Pemerintah Daerah masih belum memastikan rincian aset yang akan diserahkan dan 29 Terminal Tipe A tidak diserahkan dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Provinsi	Kota/Kabupaten	Nama Terminal	Permasalahan
1	Provinsi DKI Jakarta	Kota Jakarta Timur	Terminal Kp. Rambutan	Terminal Tipe A yang Termasuk dalam wilayah kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sesuai Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Aset Diserahkan kepada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
2	Provinsi DKI Jakarta	Kota Jakarta Timur	Terminal Pulo Gebang	
3	Provinsi DKI Jakarta	Kota Jakarta Barat	Terminal Kalideres	
4	Provinsi Jawa Barat	Kota Bogor	Terminal Baranangsiang	
5	Provinsi Jawa Barat	Kota Bekasi	Terminal Induk Bekasi	
6	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Bekasi	Terminal Kalijaya Cikarang	
7	Provinsi Jawa Barat	Kota Depok	Terminal Jatijajar	
8	Provinsi Banten	Kota Tangerang	Terminal Poris Plawad	

No	Provinsi	Kota/Kabupaten	Nama Terminal	Permasalahan
9	Provinsi Banten	Kota Tangerang Selatan	Terminal Pondok Cabe	
10	Provinsi Sulawesi Barat	Kabupaten Majene	Terminal Majene	Tidak termasuk dalam simpul Terminal Tipe A sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1361/AJ.106/DRJD/2003 tahun 2003 dan tidak termasuk dalam rencana penetapan lokasi Terminal Tipe A
11	Provinsi Bali	Kabupaten Gianyar	Terminal Gianyar	
12	Provinsi Bali	Kabupaten Buleleng	Terminal Banyuasri	
13	Provinsi Kalimantan Timur	Kabupaten Kutai Kartanegara	Terminal Kota Bangun	
14	Provinsi Bengkulu	Kabupaten Bengkulu Utara	Terminal Arga Makmur	
15	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Mandailing Natal	Terminal Penyabungan	
16	Provinsi Bali	Kota Denpasar	Terminal Ubung	Terminal beralih fungsi menjadi Terminal Tipe C
17	Provinsi Jambi	Kota Sungai Penuh	Terminal Sungai Penuh	Terminal beralih fungsi menjadi kantor Pemerintah Kota Sungai Penuh
18	Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung	Terminal Cicahem	Terminal beralih fungsi menjadi Terminal Tipe C
19	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Wonosobo	Terminal Sapen	Terminal beralih fungsi menjadi SPBU
20	Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang	Terminal Terboyo	Terminal beralih fungsi menjadi tempat parkir kendaraan barang
21	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Banjarnegara	Terminal Banjarnegara	Terminal beralih fungsi menjadi terminal tipe B dan sudah ditetapkan dalam Penetapan Lokasi Terminal Tipe B oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
22	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Situbondo	Terminal Situbondo	Terminal beralih fungsi menjadi terminal tipe B dan sudah ditetapkan dalam Penetapan Lokasi Terminal Tipe B oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
23	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Pamekasan	Terminal Ronggosukowati	Terminal beralih fungsi menjadi terminal tipe B dan sudah ditetapkan dalam Penetapan Lokasi Terminal Tipe B oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
24	Provinsi NTB	Kabupaten Lombok Barat	Terminal Sweta	Terminal beralih fungsi menjadi lahan kosong
25	Provinsi NTT	Kabupaten Belu	Terminal Motoain	Terminal beralih fungsi menjadi kantor PLBN

No	Provinsi	Kota/Kabupaten	Nama Terminal	Permasalahan
26	Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado	Terminal Malalayang	Terminal beralih fungsi menjadi terminal tipe B. Sudah digantikan oleh terminal Liwas
27	Provinsi Bali	Kabupaten Karangasem	Terminal Karangasem	Merupakan Terminal Tipe C
28	Provinsi Sumatera Selatan	Kabupaten Muara Enim	Terminal Muara Enim	Setelah dilakukan evaluasi teknis oleh tim teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Terminal Regional Muara Enim dinyatakan tidak layak sebagai Terminal Tipe A. saat ini terminal hanya digunakan sebagai lahan parkir
29	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Labuhan Batu	Terminal Padang Bulan	Berdasarkan Surat No 550/5/28/Dishub/2018 Pemkab Labuhan Batu akan menggunakan terminal tersebut sebagai perkantoran organisasi perangkat daerah Kab Labuhan Batu serta menyarakan kemenhub untuk mencari lahan pengganti guna dibangun Terminal Tipe A

b. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)

Sudah Register	Proses BAST	Inventarisasi Akhir	Inventarisasi Awal	Tidak Diserahkan	Total UPPKB
125	7	2	1	6	141

Dari total jumlah 141 UPPKB, terdapat 125 UPPKB yang telah diserahkan kepada Kementerian Perhubungan dan telah tercatat sebagai aset Kementerian Perhubungan c.q Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagaimana terlampir pada *Lampiran Vb*, terdapat 7 UPPKB yang sedang proses Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST), 2 UPPKB yang masih dalam proses Inventarisasi Akhir (Proses Penyusunan BAST), 1 UPPKB masih dalam proses inventarisasi awal dimana Pemerintah Daerah masih belum memastikan rincian aset yang akan diserahkan dan 6 tidak diserahkan dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Provinsi	Nama UPPKB	Justifikasi
1	Riau	Tarantang Manuk	Lahan Milik Pemerintah Kabupaten Palalawan, akan beralih fungsi.
2	Jawa Tengah	Butuh	Lahan Milik Pemerintah Kabupaten Purworejo, Sudah Tidak Beroperasi.
3	Jawa Tengah	Tugu	Lahan Milik Pemerintah Kota Semarang, akan beralih fungsi.
4	Jawa Tengah	Katon Sari	Lahan Milik Pemerintah Kabupaten Demak, Sudah Tidak Beroperasi.
5	Bengkulu	Air Sebakul	Lahan Milik Pemerintah Kota Bengkulu. Lokasinya tidak strategis sehingga tidak efektif untuk dioperasikan. UPPKB akan beralih fungsi.
6	Sulawesi Utara	Amurang	Lahan Milik Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, akan beralih fungsi.

F.7 Penyertaan Modal Pemerintah Pusat

Dalam rangka penyediaan sarana perhubungan darat khususnya terkait penyediaan angkutan jalan dan penyeberangan, Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan bekerjasama sama dengan Badan Usaha Milik Negara dalam penyediaan Kapal Penyeberangan dan Bus. Penyertaan Modal Negara berupa Kapal Penyeberangan akan dioperasikan oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Bus akan dioperasikan oleh Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) dan Perusahaan Umum DAMRI. Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), adalah sebagai berikut:

No	BUMN	Tahun	Unit	Jumlah Nilai
1	Perum PPD	2015	600	708.385.000.000
2	Perum Damri	2015 s.d 2016	352	305.609.200.000
3	Perum Damri	2015	67	70.262.600.000
4	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2014 s.d 2020	30	891.068.662.974
5	Perum Damri	2020	138	68.168.400.000
6	Perum PPD/Perum Damri	2018	23	16.225.000.000
Total			1.210	2.059.718.862.974

Proses Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	BUS		KAPAL	
	Kuantitas	Nilai Perolehan	Kuantitas	Nilai Perolehan
I. PROSES PMPP				
Penghapusan	-	-	-	-
Serah Terima PMPP	-	-	-	-
Terbit Peraturan Pemerintah PMPP			-	-
Terbit Persetujuan Pemindahtanganan	600	708.385.000.000	5	211.389.028.900
Selesai Penilaian dan Proses Permohonan Persetujuan			9	305.920.479.924
Proses Penilaian	-	-	4	113.848.846.100
Usulan Permohonan Persetujuan	557	444.040.200.000	-	-
SUBTOTAL	1.157	1.152.425.200.000	18	631.158.354.924
II. RENCANA PMPP				
Inventarisasi Data Dukung	-	-	5	178.775.898.650
Masih Dalam Pembangunan	-	-	1	39.548.410.000
Lain-Lain	23	16.225.000.000	6	41.585.999.400
SUBTOTAL	23	16.225.000.000	12	259.910.308.050
TOTAL	1.180	1.168.650.200.000	30	891.068.662.974

1. Barang Milik Negara dalam Proses PMPP

Per 30 Juni 2023, sebanyak 1.157 (seribu seratus lima puluh tujuh) unit bus senilai Rp1.152.425.200.000,00 dan 18 (delapan belas) unit kapal penyeberangan senilai Rp631.158.354.940,00 sudah dalam proses pemindahtanganan dengan mekanisme penyertaan modal pemerintah pusat.

1. Telah terbit persetujuan pemindahtanganan BMN melalui mekanisme PMPP antara lain:
 - a) 600 (enam ratus) unit Bus pada Direktorat Angkutan Jalan senilai Rp708.385.000.000,00 telah terbit persetujuan pemindahtanganan dengan mekanisme PMPP kepada Perum PPD sesuai dengan S-133/MK.6/2023 tgl 17 Maret 2023 (Persetujuan Pemindahtanganan BMN melalui mekanisme

PMPP dengan nilai taksiran Rp282.414.857.040,00) dan telah terbit Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2023 tgl 18 Januari 2023 (Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Perum PPD).

b) 5 (unit) kapal penyeberangan diserahkan kepada PT. ASDP Indonesia Ferry pada:

1. Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan sebanyak 3 (tiga) unit, berupa **KMP Kokonao, KMP Memberamo Foja, dan KMP Drajat Paciran** senilai total Rp147.100.238.900,00 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-81/MK.6/2023 tgl 15 Feb 2023 dan S-182/MK.6/2023 tgl 07 Juni 2023.
 2. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT sebanyak 1 (satu) unit, berupa KMP Lakaan senilai Rp34.897.245.000,00 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-434/MK.06/2023 tgl 17 Mei 2023.
 3. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIV Provinsi Maluku Utara sebanyak 1 (satu) unit, berupa KMP Lompa senilai Rp29.391.545.000,00 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-434/MK.06/2023 tgl 17 Mei 2023.
2. Telah dilakukan penilaian dan sedang dalam proses permohonan persetujuan kepada Presiden antara lain 9 (unit) kapal penyeberangan yang diserahkan kepada PT. ASDP Indonesia Ferry pada:
- a) Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan sebanyak 7 (tujuh) unit senilai total Rp242.123.789.924,00 berupa:
4. **KMP Bamega Jaya**, sesuai dengan Surat No. S-851/MK.06/2023 tgl 18 Oktober 2023 hal Permohonan Persetujuan Pemindahtanganan BMN berupa KMP Bamega Jaya dgn nilai wajar Rp24.360.359.000,00.
 5. **KMP Munggiyango Hulalo**, sesuai dengan S-835/MK.06/2023 tgl 15 Oktober 2023 hal Permohonan

- Persetujuan Pemindahtanganan BMN berupa KMP Munggiyango Hulalo dgn nilai wajar Rp33.270.968.000,00.
6. **KMP Bahtera Nusantara 01**, sesuai dengan S-909/MK.06/2023 tgl 01 November 2023 hal Permohonan Persetujuan Pemindahtanganan BMN berupa KMP Bahtera Nusantara 01 dgn nilai wajar Rp86.695.291.000,00.
7. **KMP Takabonerate, KM Emfote, KM Itaufili, dan KMP Binar**, sesuai dengan S-931/MK.06/2023 tgl 17 November 2023 hal Permohonan Persetujuan Pemindahtanganan BMN berupa KMP Takabonerate, Emfote, Itaufili dan Binar dgn nilai wajar Rp68.191.442.000,00.
- b) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara sebanyak 2 (dua) unit senilai Rp63.796.690.000,00 berupa **KMP Ihan Batak dan KMP Pora-Pora** sesuai dengan S-850/MK.06/2023 tgl 18 Oktober 2023 hal Permohonan Persetujuan Pemindahtanganan BMN berupa KMP Ihan Batak & Pora-pora dgn nilai wajar Rp56.739.503.000,00.
3. Sedang dalam proses penilaian oleh Direktorat Penilaian, DJKN antara lain kapal penyeberangan yang diserahkan kepada PT. ASDP Indonesia Ferry pada:
- a) Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp39.334.438.000,00 berupa **KMP Sultan Murhum II**;
- b) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIX Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebanyak 2 (dua) unit senilai Rp67.328.459.000,00 berupa **KMP Opudi dan KMP Pangkilang**;
- c) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIV Provinsi Maluku Utara sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp7.185.949.100,00 berupa **KMP Kolorai**.
4. Usulan permohonan persetujuan untuk 557 (lima ratus lima puluh tujuh) unit bus senilai total Rp444.040.200.000,00 yang

diserahkan kepada Perum Damri pada Direktorat Angkutan Jalan berupa:

- a. 67 (enam puluh tujuh) unit bus Tahun 2015 senilai Rp70.262.600.000,00 sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal Kemenhub Nomor PM.001/1/4 Phb 2023 tanggal 20 Januari 2023;
- b. 352 (tiga ratus lima puluh dua) unit bus Tahun 2015 dan 2016 senilai Rp305.609.200.000,00 sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal Kemenhub Nomor PL.201/8/20 PHB 2023 tanggal 30 Mei 2023;
- c. 138 (seratus tiga puluh delapan) unit Micro Bus Tahun 2020 senilai Rp68.168.400.000,00 sesuai dengan PL.402/3/18 PHB 2023 tanggal 28 Juni 2023

2. Barang Milik Negara yang Direncanakan untuk PMPP

Per 30 Juni 2023, sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit bus senilai Rp16.225.000.000,00 direncanakan akan diserahkan kepada Perum Damri dan 8 (delapan) unit kapal penyeberangan senilai Rp259.910.308.050,00 kepada PT ASDP Indonesia Ferry melalui mekanisme penyertaan modal pemerintah pusat.

1. Sebanyak 5 (lima) kapal penyeberangan senilai Rp178.775.898.650,00 sedang dalam proses usulan permohonan persetujuan PMPP, yaitu
 - a) 1 (satu) unit kapal penyeberangan senilai Rp25.583.928.000,00 pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Sumatera Barat berupa **KMP Puteri Leanpuri**, sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor PM.001/1/1/DJPD/2023 tgl 6 Februari 2023.
 - b) 2 (dua) unit kapal penyeberangan senilai total Rp129.377.120.650,00 pada Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan berupa **KMP Tirus Meranti dan KMP Bahtera Nusantara 03**, sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor PM.001/1/2/DJPD/2023 tgl 6 Februari 2023.

- c) 2 (dua) unit bus air senilai total Rp23.814.850.000,00 pada Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan berupa **KM Asa Asa dan KM Jurung Jurung**, sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor PM.001/1/3/DJPD/2023 tgl 6 Februari 2023.
2. Sebanyak 1 (satu) unit kapal senilai Rp39.548.410.000,00 masih dalam proses pembangunan, yaitu KMP Oputa Yi Koo.
 3. Sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit bus senilai Rp16.225.000.000,00 masih dalam proses pembahasan terkait penyerahannya, apakah akan diserahkan kepada Perum PPD atau Perum Damri setelah dilaksanakan merger antara Perum Damri dan Perum PPD;
 4. Sebanyak 5 (lima) bus air senilai total Rp9.812.851.400,00 pada Direktorat Transportasi Sungai Danau, dan Penyeberangan masih dalam perbaikan, berupa Bus Air ASMAT.
 5. Sebanyak 1 (satu) unit kapal penyeberangan senilai Rp31.773.148.000,00 pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara masih menunggu pelunasan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang harus dipenuhi oleh kontraktor.

F.8 Monitoring To Do List pada aplikasi MonSAKTI

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi melalui aplikasi Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (MonSAKTI) Tingkat UAPPA-E1 atas pelaksanaan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian Akun dengan Kode Barang Persediaan;
2. Ketidaksesuaian Akun dengan Kode Barang BMN;
3. Saldo Tidak Normal;

TERMINAL LEUWIPANJANG



Direktorat Jenderal Perhubungan Darat KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BANDUNG - JAKARTA
AC EXECUTIVE
CILILITAN
TOL CIPULARANG



(021) 3506138, 3506129



AKUNTANSIHUBDAT@GMAIL.COM



GEDUNG KARYA LT. 12,
JL MEDAN MERDEKA BARAT NO 8, JAKARTA



[HTTPS://HUBDAT.DEPHUB.GO.ID](https://hubdat.dephub.go.id)